

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KB  
DALAM MENGATASI PERMASALAHAN  
KEPENDUDUKAN**

**(Studi pada Desa Gogodeso, Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**YOGA ARI HADI**

**NIM. 115030100111034**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2018**

## MOTTO

*Berharaplah kepada Tuhan.*

*Karena berharap kepada manusia itu menyakitkan/mengecewakan.*

*(Mayda Ria Arisanti)*

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

”Untuk alm. Ayahku yang selalu menjadi inspirasiku,  
Ibuku yang selalu mendoakanku setiap waktu, Kakakku  
yang selalu memberi dukungan dan semangat, serta  
Keponakanku Mirza dan Alfa yang telah memberikan  
kasih sayangnya dan keceriaan padaku.  
Juga untuk semua sahabat yang telah memberikan pelajaran  
hidup dan semangat dalam hidupku”.

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Kebijakan Kampung KB Dalam Mengatasi  
Permasalahan Kependudukan (Studi pada Desa  
Gogodeso, Kabupaten Blitar)

**Disusun Oleh** : Yoga Ari Hadi

**NIM** : 115030100111034

**Fakultas** : Ilmu Administrasi

**Jurusan** : Administrasi Publik

Malang, 11 Desember 2017

Komisi Pembimbing



**Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA**  
**NIP. 19711013 200003 2 001**

## **TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2018

Jam : 09.00 – 10.00 WIB

Skripsi atas Nama : Yoga Ari Hadi

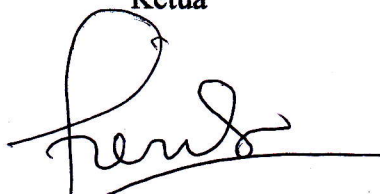
Judul : Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana

Dalam Mengatasi Permasalahan Kependudukan

Dan dinyatakan **LULUS**

### **MAJELIS PENGUJI**

Ketua



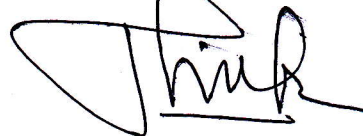
**Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA**  
**NIP. 19711013 200003 2 001**

Anggota



**Dr. Fadillah Amin, Ph.D, M.Si**  
**NIP. 19520911 197903 1 002**

Anggota



**Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA**  
**NIP. 19860716 201404 1 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 12 Desember 2017



**Yoga Ari Hadi**  
**115030100111034**

## RINGKASAN

Yoga Ari hadi, 2017. **Implementasi Kebijakan Kampung KB dalam Mengatasi Permasalahan Kependudukan (Studi pada Desa Gogodeso, Kabupaten Blitar).**

Ibu Firda Hidayati, S.sos, DPA, MPA. 127 Halaman

---

Implementasi Kebijakan Kampung KB merupakan kebijakan yang mencakup satuan wilayah setingkat RW, pedukuhan atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Kebijakan Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Sementara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan. Implementasi Kebijakan Kampung KB berlokasi di Desa Gogodeso, khususnya Dusun Gogodeso dan diharapkan tantangan dan permasalahan kependudukan dapat terpecahkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mampu menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil kesimpulan. Melalui penelitian ini akan diperoleh output penelitian berupa analisis kualitatif mengenai implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso.

Kebijakan Kampung KB Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro adalah inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh. Implementasi Kebijakan Kampung KB ditargetkan berjalan selama 36 bulan dan telah berjalan selama 16 bulan dan Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang bertugas sebagai implementator telah melakukan pembinaan dan pemantauan sehingga target dan sasaran Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso dapat terealisasi.

*Kata Kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, kebijakan kampung kb.*

## SUMMARY

Yoga Ari hadi, 2017. **Implementation of Family Planning Policy in Addressing Population Problems (Study on Gogodeso Village, Blitar District)**. Mrs. Firda Hidayati, S.Sos, DPA, MPA. 127 Pages.

---

Implementation of the Kampung KB policy is a policy covering a RW-level, hamlet or equivalent unit, which has certain criteria, where there is a synchronized program of population, family planning, family development and related sector development systematically and systematically implemented and aims to address the problems population. The Kampung KB policy is planned, implemented and evaluated by and for the community. While central government, local government, non-government and private institutions play a role in facilitation, mentoring and coaching. Implementation of Kampung KB policy is located in Gogodeso Village, especially Dusun Gogodeso and it is expected that the challenges and problems of residence can be solved.

The type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach. Descriptive research is able to describe or solve problems systematically, factually and accurately about the facts and characteristics of a particular population or region. Descriptive research with a qualitative approach reveals the fact what it is about an object, symptoms, circumstances by describing, describing, interpreting and taken conclusions. Through this research will be obtained the research output in the form of qualitative analysis of the implementation of Kampung KB policy in overcoming the demographic problems in Dusun Gogodeso.

The Dusun Gogodeso, Gogodeso Village, Kanigoro District is a strategic innovation to implement the priority activities of the Population, Family Planning and Family Development (KKBPK) Program as a whole. Implementation of the Kampung KB Policy is targeted to run for 36 months and has been running for 16 months and the Working Group (POKJA) and Activity Group (POKTAN) serving as implementers have conducted guidance and monitoring so that the target and target of Kampung KB Policy in overcoming the population problem in Dusun Gogodeso can be realized.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, Kampung KB Policy.



## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO .....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
TANDA PERSETUJUAN .....	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik.....	13
1. Pengertian Kebijakan.....	13
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	16
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	19
4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	21
5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	22
B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	23
1. Implementasi Kebijakan Publik .....	23
2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik .....	28
3. Hambatan Implementasi Kebijakan Publik .....	38
4. Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik.....	40
C. Pemerintah Daerah .....	41
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	41
2. Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah .....	43
3. Peran Pemerintah Daerah .....	46

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	49
---------------------------	----

B. Fokus Penelitian .....	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Metode Analisis Data .....	56

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar.....	60
2. Gambaran Umum Desa Gogodeso .....	62
3. Kampung KB Dusun Gogodeso .....	65
B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	67
1. Implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar .....	67
a. Komunikasi .....	68
b. Sumber Daya.....	81
c. Disposisi.....	89
d. Struktur Birokrasi.....	95
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.....	101
a. Faktor Pendukung .....	101
b. Faktor Penghambat .....	103
C. Analisis Data .....	103
1. Implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.....	104
a. Komunikasi .....	104
b. Sumber Daya.....	109
c. Disposisi.....	114
d. Struktur Birokrasi.....	115
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.....	119
a. Faktor Pendukung .....	119

	b. Faktor Penghambat .....	120
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	122
	B. Saran.....	126
<b>Daftar Pustaka.....</b>		<b>127</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan .....	21
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan .....	33
Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	57
Gambar 4. Peta Administrasi Desa Gogodeso .....	63
Gambar 5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gogodeso ...	66
Gambar 6. Bagan Kebijakan Kampung KB .....	68
Gambar 7. Sosialisasi Kampung KB di Desa Gogodeso .....	72
Gambar 8. Kondisi Rumah Tangga Dusun Gogodeso .....	79
Gambar 9. Kondisi Rumah Tangga Dusun Gogodeso .....	79
Gambar 10. Struktur Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso .....	99
Gambar 11. Struktur Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso .....	100
Gambar 12. Partisipasi Aktif Masyarakat Dusun Gogodeso .....	102

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar 2010 – 2016 .....	5
Tabel 2. Sebaran Penduduk di Kabupaten Blitar .....	61
Tabel 3. Pejabat Pemerintah Desa Gogodeso .....	65
Tabel 4. Badan Permusyawaratan Desa Gogodeso .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan negara-negara di dunia pada abad 21 adalah permasalahan yang terkait dengan ledakan penduduk dunia (sumber: *www.bbc.co.uk*, diakses pada 25 Februari 2017). Ledakan penduduk mempengaruhi dunia dalam segala lini mulai sektor ekonomi, sosial dan politik. Tidak hanya pada sektor tersebut tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia berupa air dan udara yang akan berdampak terhadap perubahan iklim global. Sebuah laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilansir oleh laman BBC Indonesia memperkirakan penduduk dunia akan mencapai angka 8,5 miliar jiwa pada 2030, dan 9,7 miliar jiwa pada penghujung 2050, serta 11,2 miliar di akhir abad ini (sumber: *www.bbc.co.uk*, diakses pada 25 Februari 2017).

Ledakan penduduk dunia setiap tahun yang semakin meningkat membuat bumi semakin sesak dan membawa ancaman mematikan akan ketidakmampuan alam untuk menampung dan menyediakan kebutuhan manusia, termasuk tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang adalah mengurangi jumlah ledakan penduduk. Sebagai satu negara yang sedang berkembang, tentunya Indonesia akan mengalami banyak permasalahan disebabkan oleh ledakan penduduk yang terjadi. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama negara di kawasan Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan ke-3 di antara negara-negara yang sedang berkembang di dunia dengan total jumlah penduduk 225,27

juta jiwa, setelah Cina dengan total 1,306 milyar jiwa dan India 1,068 milyar jiwa (sumber: *www.bbc.co.uk*, diakses pada 25 Februari 2017).

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi agar tidak terjadi ledakan penduduk yang tidak terkontrol sehingga melahirkan permasalahan kependudukan yang kompleks. Masalah kependudukan di Indonesia antara lain jumlah penduduk yang semakin meningkat, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan kualitas penduduk yang masih rendah. Hal ini dibarengi dengan masalah lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi.

Masalah-masalah lain seperti ketenagakerjaan ataupun angkatan kerja dengan pendidikan rendah. Dampaknya terhadap pendapatan perkapita yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Juga terhadap kehidupan rumah tangga seperti perceraian dan perkawinan yang akan berpengaruh terhadap angka kelahiran dan kematian yang dalam banyak hal dijadikan indikator bagi kesejahteraan suatu negara. Selain itu dampak ledakan penduduk di Indonesia adalah jumlah pengangguran semakin meningkat, kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan gizi rendah, kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perumahan sukar diperoleh serta angka kemiskinan yang akan meningkat drastis.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki luas wilayah 47.922 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk mencapai 38,85 juta jiwa (sumber: *www.bps.go.id*, diakses pada 26 Februari 2017 ). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak

kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur sangat berpotensi terjadinya ledakan penduduk yang menghasilkan permasalahan kependudukan mengingat masih banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bersedia mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Menurut Muhammad Is selaku pejabat lama Kepala BKKBN Jawa Timur mengatakan "Pasangan usia 15-35 tahun yang merupakan usia produktif di Jawa Timur sangat tinggi, kalau tidak dikendalikan, mereka berperan besar terhadap terjadinya *baby boom* (ledakan penduduk)" (sumber: *www.kompas.com*, diakses pada 24 Februari 2017).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk supaya setiap kepala keluarga cukup memiliki anak dua sehingga permasalahan kependudukan kedepannya tidak semakin pelik. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Selain itu, disebutkan juga dalam undang-undang tersebut bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Prioritas pengendalian permasalahan kependudukan masuk dalam program prioritas Provinsi Jawa Timur. Menurut Gus Ipul selaku wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur mengatakan "Jawa Timur masih berpotensi terjadi ledakan penduduk



sehingga untuk remaja yang akan menikah dan keluarga yang sudah memiliki anak 2 atau lebih perlu diberikan pemahaman kembali”. Lebih lanjut Gus Ipul menyarankan kepada setiap daerah untuk terus melakukan sosialisasi, kepada masyarakat untuk mencegah ledakan penduduk (sumber: *www.prosalinaradio.com*).

Salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur turut mendukung program pengendalian penduduk dan pengentasan permasalahan kependudukan adalah Kabupaten Blitar. Keprihatinan akan permasalahan kependudukan melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dari sini pula lahirlah kesadaran Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengurai masalah yang lahir dari ledakan penduduk melalui pendekatan kependudukan. Sejalan dengan program kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang merupakan bagian dari pondasi pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas sesuai dengan Agenda Prioritas 5 (lima) dari 9 agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo periode 2015 – 2019 yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Hal tersebut sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Blitar yaitu mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar cukup tinggi. Adapun data peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar 2010 – 2016**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2010	1.118.919 orang
2	2011	1.124.775 orang
3	2012	1.130.423 orang
4	2013	1.136.701 orang
5	2014	1.140.793 orang
6	2015	1.145.396 orang
7	2016	1.149.710 orang

Sumber: *blitarkab.bps.go.id*

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Blitar mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya dan sangat berpotensi untuk mengalami ledakan penduduk yang tidak terkontrol sehingga pada akhirnya menghasilkan permasalahan kependudukan. Pemerintah Kabupaten Blitar sadar jika tidak ada pengendalian penduduk maka akan terjadi permasalahan kependudukan yang cukup rumit dikemudian waktu.

Menurut Rijianto selaku Bupati Kabupaten Blitar mengatakan “Angka kelahiran yang terkendali akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus nantinya” (sumber: *www.blitarrayanews.com*, diakses pada 25 Februari 2017). Pengendalian penduduk yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar dan *stakeholder* terkait adalah peluncuran Kebijakan kampung KB pada tahun 2016. Adapun sasaran strategis dari Kebijakan kampung KB yang telah ditetapkan, yaitu: (1) menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP), (2) Menurunnya *total fertility rate* (TFR) Wanita Usia Subur (WUS), (3) Meningkatnya *contraceptive prevalence rate* (CPR) Pasangan Usia Subur (PUS), (4) Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/*unmet need*, (5) Menurunnya *Age Spesific Fertility Rate*

(ASFR), (6) Menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (sumber: DPPKB Kab. Blitar: 2016)

Menurut Winarno (2012: 146), Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Sehingga di Kabupaten Blitar, implementasi Kebijakan kampung KB akan menjadi salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta wadah pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah serta dilaksanakan di tingkatan terendah di Kabupaten/kota.

Definisi Kampung KB pada kamus Istilah Kependudukan dan KB yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2011 adalah sebagai salah satu upaya penguatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas (sumber: DITTIFDOK, 2011: 53). Implementasi Kebijakan kampung KB juga ditujukan untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan

keluarga melalui program kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatkan derajat kesehatan pada umumnya. Tujuan khusus lainnya adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah, meningkatkan sarana prasarana pembangunan kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih serta meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan).

Lebih lanjut Kebijakan kampung KB dimaknai sebagai program kebijakan yang mencakup satuan wilayah setingkat RW, pedukuhan atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kebijakan kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Sementara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Pemerintah Kabupaten Blitar diwakili oleh Rijianto selaku Bupati Kabupaten Blitar mengatakan:

“Pencanangan Kampung KB ini adalah gerakan dari program-program KB yang mampu bersinergi dengan program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Antara lain dengan sosialisasi, komunikasi, edukasi tentang program KB kepada masyarakat, dan pelayanan KB di tingkat desa. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pengendalian angka

kelahiran penduduk serta pengentasan permasalahan kependudukan” (sumber: [www.blitarrayanews.com](http://www.blitarrayanews.com), diakses pada 25 Februari 2017).

Pencanangan Kebijakan kampung KB di Kabupaten Blitar dilakukan pada Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi tersebut pada umumnya didasarkan pada permasalahan kependudukan di sana yang masih cukup tinggi.

Implementasi Kebijakan kampung KB melibatkan *stakeholder* lintas sektoral antara lain Kepala Desa Gogodeso selaku pelaksana pemerintahan tingkat Desa Gogodeso yang menyediakan data terkait dengan sasaran pelaksanaan kegiatan Kampung KB yang telah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. Pembentukan kelompok kerja dan kelompok kegiatan ditujukan sebagai pelaksana kebijakan Kampung KB di Dusun Gogodeso. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar berperan sebagai pembuat kebijakan Kampung KB yang akan dicanangkan di Desa Gogodeso dan melalui persetujuan Bupati Blitar.

Ruang lingkup kegiatan Kebijakan kampung KB di Desa Gogodeso, Kabupaten Blitar berdasarkan Profil Kampung KB Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso meliputi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) serta kegiatan lintas sektor (bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (sumber: Profil Kampung KB, 2016: 2). Untuk itu, dengan penerapan Kebijakan kampung KB di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro bisa menjadi miniatur pelaksanaan Program

KB secara menyeluruh dan terpadu lintas sektor yang tergabung dalam Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (KKBS).

Dewasa ini tantangan penerapan kebijakan Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso semakin kompleks. Misalnya, masih adanya pernikahan dini, rendahnya peserta KB pada pria serta masih adanya *trafficking* dan pelecehan seksual maupun KDRT. Selain tantangan tersebut dalam implementasi Kebijakan kampung KB terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi seperti halnya kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan Kebijakan kampung KB, perspektif masyarakat yang masih konservatif terhadap Kebijakan kampung KB, pengawasan dari implementasi Kebijakan kampung KB yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, pendanaan dari implementasi Kebijakan kampung KB, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat desa dan lain sebagainya. Terkait hal itu, Peneliti tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Desa Gogodeso, khususnya Dusun Gogodeso sebagai lokasi implementasi kebijakan Kebijakan kampung KB di Kabupaten Blitar dan diharapkan tantangan dan permasalahan kependudukan dapat terpecahkan. Kepala Dinas PPKB Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa:

“Tujuan pencanangan Kampung KB sebagai upaya meningkatkan partisipasi atau peran masyarakat terkait Program KB, juga turut menyukseskan Program Nawa Cita, yakni membangun dari pinggiran melalui Program kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera” (Humas Pemkab Blitar: 2016).

Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian skripsi **“Implementasi Kebijakan kampung KB dalam Mengatasi Permasalahan Kependudukan (Studi pada Desa Gogodeso, Kabupaten Blitar)”**. Pengetahuan masyarakat yang baik tentang implementasi Kebijakan kampung KB dapat mendukung keberhasilan dalam mencapai target dari pelaksanaan program tersebut,

sebab itu Pemerintah Kabupaten Blitar menjadikan Kebijakan kampung KB sebagai salah satu strategi pengentasan permasalahan kependudukan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan kampung KB di Desa Gogodeso, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan kampung KB di Desa Gogodeso, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Kebijakan kampung KB di Desa Gogodeso, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan kampung KB di Desa Gogodeso, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi Mahasiswa, Fakultas Ilmu Administrasi, ataupun Instansi yang bersangkutan. Adapun kontribusi penelitian ini yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah implikasi teoritis bagi peneliti dan pembaca dalam kajian tentang kebijakan publik, kebijakan pemerintah daerah,

implementasi kebijakan publik, Kebijakan KB, pengendalian pertumbuhan penduduk, strategi pengentasan permasalahan kependudukan, pemberdayaan masyarakat.

## 2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pengambil kebijakan (*policy maker*) yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan Kebijakan kampung KB serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dari proposal penelitian ini merupakan pokok-pokok uraian secara umum, dengan maksud agar segala sesuatu yang dibahas dapat diketahui dan dimengerti hubungannya secara tepat dari tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dalam isinya menguraikan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian terdahulu (Skripsi, Tesis, Disertasi) maupun teori dari beberapa ahli.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, dan Metode Analisis



Data. Sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data penelitian yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisis Data dari data yang telah disajikan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian dan saran terkait temuan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kebijakan Publik**

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan publik secara baik (Henry dalam Keban, 2004: 5). Dalam administrasi publik terdapat kajian tentang kebijakan publik yang ditujukan untuk seluruh kalangan baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum.

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Federick dalam Agustino (2008: 7) mendefinisikan pengertian kebijakan adalah sebagai suatu serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan.

Wahab (2008: 40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Winarno (2007: 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar,

proposal dan *grand design*. Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

Anderson dalam Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Rose dalam Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak

dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/ provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2007: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini, dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Eyestone dalam Agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih

terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Nugroho (2011: 45) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye dalam Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dan dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik

atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Easton dalam Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the autorative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### 3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap penyusunan agenda

Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini



masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Adopsi kebijakan dari sekian banyak yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

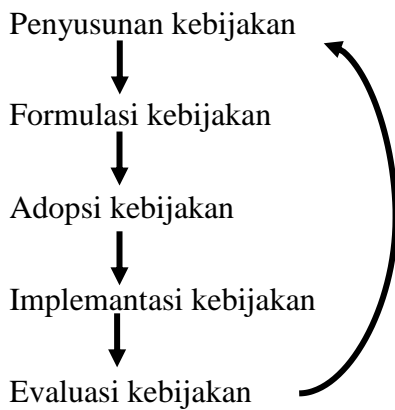
d. Tahap implementasi kebijakan

Program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang

diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:



*Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan (Dunn dalam Winarno, 2007: 32-34)*

#### **4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam

proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

### **5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang

dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

## **B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

### **1. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2012:147).

Van meter dan Van horn dalam Wahab (2008: 65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 149-150) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Mazmanian & Sabatier (Wahab, 2004: 68), *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions* (Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan).” Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata; baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak

keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/ peraturan yang bersangkutan. Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Ripley dan Franklin dalam Winarno, (2012: 148-149) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi merujuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan

pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi bebankerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Winarno (2012: 149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*,” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik diartikan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individu adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkaran kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, maka dapat menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah

ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Adapun pengertian kebijakan yaitu sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan konsep-konsep tentang implementasi kebijakan di atas, maka penulis menyimpulkan implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa implementasi dan kebijakan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan.

Implementasi sebagai kata kerja dan kebijakan sebagai objek untuk yang diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti



akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta berusaha keras untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan.

## **2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Winarno (2012: 146), Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Nugroho (2008: 436), bahwa perumusan kebijakan (rencana) hanya memiliki porsi 20% keberhasilan, sedangkan implementasi adalah 60%, sedangkan sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Itu artinya, implementasi adalah proses yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utamanya adalah konsistensi implementasi. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Ada begitu banyak model-model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial dan beberapa

model tersebut dikembangkan oleh beberapa pakar sosial sebagai alat untuk mengkaji apa-apa saja bentuk (jenis) implementasi kebijakan, apa saja variable-variabel serta syarat-syarat agar implementasi kebijakan tersebut bisa menjadi berhasil secara sempurna.

Beberapa model kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial tersebut Nugroho (2008: 438- 447) adalah:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn Suharno (2013: 176-177) model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut.

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan memang realistis dengan *sosio-cultur* yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Setiap kebijakan publik harus

mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Jika di dalam sebuah kebijakan standar dan sasarannya tidak jelas, maka tidak akan bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman serta konflik di antara para agen implementasi.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 159), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisa implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

## 2) Sumber daya

Van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 161), selain ukuran ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencangkup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Van Meter dan Horn dalam Agustino, (2008:142) keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dri kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Selain sumber daya manusia, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, (2008: 142) sumber-sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan politik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik,

### 3) Hubungan antar organisasi

Van Meter dan Horn dalam Suharno (2013:177), di dalam program-program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan penting dari sebuah organisasi demi terealisasinya program-program organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahankesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya Agustino, (2008:144).

#### 4) Karakteristik agen pelaksana

Van Meter dan Van Horn Suharno, (2013: 177) dalam suatu implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

#### 5) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Sumberdaya ekonomi pada lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik parapartisipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan Suharno, (2013: 177).

#### 6) Disposisi implementor

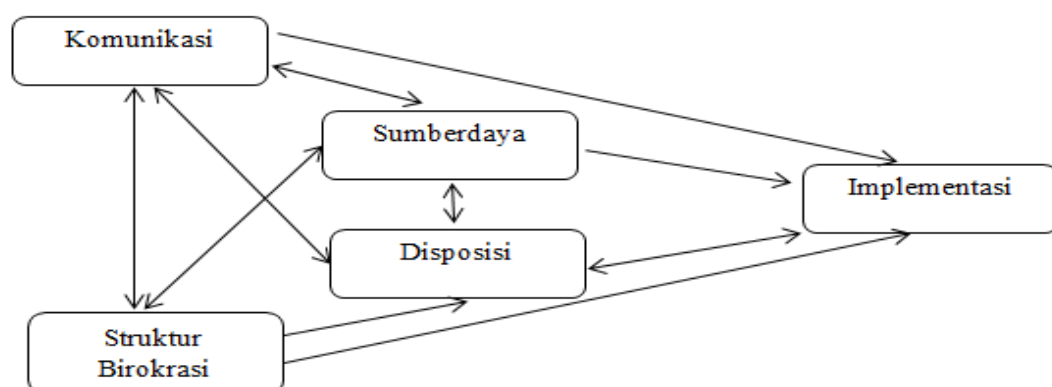
Menurut Meter dan Horn dalam Suharno, (2013:177) implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : (1) Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (3) Intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki.

#### b. Model George C. Edward III

Edward III (2009:48) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Edward

melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Edward III dalam Winarno, (2012: 177) studi implementasi adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: apa yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan serta apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut, maka Edward III dalam Winarno, (2012: 177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:



Gambar 2. Sumber : Implementing Public Policy 1980 George C. Edward III dalam Winarno, (2012: 177)

a) Komunikasi.

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Edward III juga menjelaskan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi, yaitu transformasi, konsistensi, dan kejelasan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, yaitu:

- 1) Transformasi (transmission), pada dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran di pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.
- 2) Kejelasan (clarity), dimensi ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- 3) konsistensi (consistency), dimensi ini menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

#### b) Sumber daya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumbernya adalah: staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan serta wewenang yang dimiliki implementor untuk mensukseskan kebijakan. Namun, Edward III dalam Winarno (2012: 184-185) menyatakan bahwa ada satu hal yang harus diingat, yaitu bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan.

Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dengan demikian, tidaklah cukup hanya dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana harus memiliki keterampilan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan.

#### a) Sumber Daya Manusia



Merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Winarno (2012:177) menyatakan bahwa “sumber daya manusia, harus cukup (jumlah) dan cakap keahlian”. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (keahlian). Jika sumber daya manusia terbatas dari segi jumlah dan kualitasnya pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

b) Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Dana digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sumber daya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya anggaran juga akan menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan goal displacement yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Sumber Non Manusia

Sumber daya yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. Edward III menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan.

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena dengan informasi yang jelas mengenai suatu kebijakan para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki.

e) Disposisi

Variabel ini berkaitan dengan bagaimana sikap para implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Edward, disposisi adalah yang menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dalam melaksanakan implementasi kebijakan, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya yang dapat menjadi faktor hambatan ataupun dukungan dalam proses implementasi kebijakan. Disposisi yang dimiliki

oleh implementor menjadi salah satu variable penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan jika implementator memiliki disposisi yang buruk dapat dipastikan bahwa proses implementasi kebijakan akan berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### f) Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Edward mengatakan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

### 3. Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono dalam buku *Hukum dan kebijakan publik*, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

#### a) Kebijakan Publik

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau programprogram kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang

akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b). Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c). Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d). Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas Sunggono, (1994: 149-153).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

#### **4. Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik**

Berdasarkan pendapat Edward III Winarno, (2012:180) yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana. Definisi konseptual ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian: dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi struktur birokrasi dan dimensi disposisi pelaksana.

Dimensi komunikasi memiliki indikator-indikator: (1) Sosialisasi tujuan Kebijakan, yaitu proses sosialisasi terkait dengan tujuan yang akan dicapai kebijakan (2) Manfaat Kebijakan, yaitu memberikan sosialisasi tentang manfaat dari kebijakan. Dimensi sumber daya memiliki indikator-indikator: (3) Dukungan Aparatur, yaitu proses dukungan yang diberikan oleh aparatur berupa dukungan langsung ataupun tidak langsung (4) Dukungan anggaran, yaitu dukungan anggaran yang digunakan selama proses implementasi kebijakan (5) Dukungan fasilitas Kebijakan, yaitu dukungan fasilitas yang memadai dalam implementasi kebijakan.

Dimensi struktur birokrasi memiliki indikator-indikator: (6) Fragmentasi, yaitu pembentukan divisi sesuai dengan bagian dan tujuan implementasi kebijakan (7) Standar Prosedur Operasi, yaitu tatakerja yang harus dilakukan. (8) Komitmen Aparatur dan Dimensi disposisi pelaksana memiliki indikator-indikator: (9) Disiplin Aparatur, yaitu terkait dengan ketaatan aparatur dalam implementasi kebijakan (10) Kejujuran Aparatur, yaitu terkait dengan kejujuran yang diberikan oleh aparatur dalam proses implementasi (11) Budaya Kerja Aparatur, yaitu tatalaksana dan budaya yang dimiliki oleh aparatur dalam implementasi kebijakan (12) Sifat Demokratis Aparatur, yaitu kemampuan aparatur dalam menampung dan mengelola masukan dalam proses implementasi.

### **C. Pemerintah Daerah**

#### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Suhady dalam Tjandra (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja, Tjandra (2009: 197).

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat asas yang digunakan. Dalam hal ini Soimin (2010: 13) “Asas adalah suatu yang dianggap oleh masyarakat sebagai landasan legal (*basic truth*), sebab melalui asas tersebut lahirlah pertimbangan etis dan sosial masyarakat yang masuk kedalam hukum, dan menjadi sumber nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya”. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 menyebutkan bahwa Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari asas: a). Kepastian hukum; b). Tertib

penyelenggaraan negara; c). Kepentingan umum; d). Keterbukaan; e). Proporsionalitas; f). Profesionalitas; g). Akuntabilitas; h). Efisiensi; i). Efektivitas; dan j). Keadilan.

## **2. Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah**

### **a. Asas Desentralisasi**

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pemusatan, Nurcholis (2010: 17). Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Saligman dan Van Den Berg menganggap bahwa desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah, Gadjong (2007:80). Ruiter berpendapat bahwa desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, Gadjong (2007: 80). Sementara Litvack berpendapat bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, Gadjong (2007: 81). Koesoemahatmaja sebagaimana dikutip Ridwan (2010: 121), menyatakan bahwa desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom).



Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah, Gadjong (2007: 81). Tjahya Supriatna mengemukakan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami wilayah tertentu, Ridwan (2010: 123). Pandangan yang sama dengan Litvack, RDH Koesoemahatmaja, Gie dan Tjahja Supriarna datang dari Amrah muslimin yang berpendapat bahwa desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik didaerahnya, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu, Ridwan (2010: 121).

Pendapat lainnya datang dari Tresna yang berpandangan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan demokrasi, di dalam pemerintahan Negara, Gadjong (2007: 83). Mustamin memaparkan bahwa desentralisasi berarti pemencaran atau penyebaran wewenang dari pusat ke bagian-bagian organisasi dibawahnya, Gadjong (2007: 83). Aldfer juga yang berpendapat bahwa desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri, Gadjong (2007: 84).

Pandangan dari beberapa pakar di atas, desentralisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu: pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan

dan kekuasaan. Kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara mandiri, karena kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah hanya pemerintah daerah yang mengetahuinya lebih mendalam yang bermanfaat dalam efektifitas suatu kebijakan yang mengatur masyarakat.

#### b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi, Nurcholis (2010: 15). Menurut Leica Marzuki, dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegdheid*, yakni pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan, Gadjong (2007:89). Amrah Muslimin berpendapat bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah, Ridwan (2010: 125). Kertasapoetra mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah, Gadjong (2007: 90).

Sementara itu Djoko Prakoso mengungkapkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan kepada pejabat di daerah, tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik perencanaan, pelaksanaan maupun dalam

pembiayaan, Ridwan (2010: 125). Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi, dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi (implementasi kebijakan), sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada Pemerintah Pusat.

c. Asas Tugas Pembantuan (*Madebeward*)

Koesoemahatmadja mengertikan tugas pembantuan sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut, Nurcholis (2010: 115-116). Ridwan (2010: 126) memberikan pengertian bahwa tugas pembantuan adalah pemerintah menugaskan kepada pemerintah daerah otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-batasan pertanggung jawaban, dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Peran Pemerintah Daerah**

Peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relative bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan

menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajibankewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan

yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Leach, Stewart dan Walsh dalam Muluk, (2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam Muluk, (2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat Soekanto, (2004:245)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mampu menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan penelitian ini berupa kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam suatu kondisi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dalam suatu fenomena, Nazir (2005: 55). Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan sistematis tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada suatu daerah tertentu secara faktual dan akurat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan, dan diambil suatu kesimpulan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan *output* penelitian berupa analisis kualitatif mengenai implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ada, yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga mendorong peneliti perlu menggunakan fokus penelitian untuk membatasi area atau bidang penelitian. “Pembatasan penelitian ini dianggap perlu, karena akan membimbing dan mengarahkan pada penelitian dalam pengumpulan data yang diperlukan dan tidak diperlukan serta data mana yang tidak relevan”, Moleong (2000: 62). Hal ini sesuai dengan sifat penelitian deskriptif yang mengikuti pola pemikiran *empirical inductive*, yakni segala sesuatu dalam penelitian ini sangat ditentukan atau tergantung dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan, Moleong (2000: 63).

Penelitian ini mengadaptasi teori model implementasi kebijakan publik George C. Edward III dalam menentukan fokus penelitian. Untuk itu, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kampung KB di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang mengadaptasi model implementasi George C. Edward III, antara lain:
  - a) Komunikasi
  - b) Sumber daya
  - c) Disposisi
  - d) Struktur birokrasi

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, meliputi:

a) Faktor Pendukung

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan Kampung KB dan pencapaian sasaran dari Kebijakan Kampung KB di Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar berupa partisipasi masyarakat dan kemitraan Kampung KB.

b) Faktor Penghambat

Faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Kebijakan Kampung KB dan menghambat pencapaian sasaran dari Kebijakan Kampung KB di Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar berupa konsistensi dan pemahaman masyarakat yang kurang, ketersediaan sarana dan prasarana.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang ditetapkan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Blitar. Adapun situs penelitian ini berada di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pertimbangan peneliti untuk menetapkan pemilihan lokasi dan situs penelitian meliputi :



1. Lokasi penelitian diambil di Kabupaten Blitar karena Kabupaten Blitar memiliki terobosan dalam pengentasan permasalahan kependudukan melalui implementasi Kebijakan Kampung KB yang dicanangkan untuk mengatasi permasalahan kependudukan, antara lain pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, kesehatan balita dan lansia, kemiskinan, angka putus sekolah dan kesenjangan sosial. Berdasarkan potensi tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait, atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar dalam implementasi Kebijakan Kampung KB untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
2. Situs dalam penelitian ini adalah tempat diambilnya data yang berkaitan dengan judul penelitian. Pertimbangan pemilihan situs penelitian pada Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar didasarkan pada awal dibentuknya kampung KB, karena Desa Gogodeso adalah desa percontohan dalam pengimplementasian Kebijakan Kampung KB di Kabupaten Blitar.

#### **D. Sumber Data**

Hasan (2002:82), “Data adalah keterangan-keterangan suatu fakta mengenai sesuatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber data merupakan subyek darimana data – data atau informasi diperoleh.” Dalam penelitian ini data digali atau diperoleh melalui beberapa sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan

kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya, adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Adapun sumber data primer berasal dari warga masyarakat Desa Gogodeso, Aparatur Desa Gogodeso dan Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

#### 2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini yang berkaitan dan berhubungan dengan implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan pengoptimalisasian Kebijakan Kampung KB dan pelaksanaan implementasi Kebijakan Kampung KB seperti halnya berita di koran, internet serta catatan maupun tulisan dari sumber yang terpercaya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2009: 224). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid

dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Hal ini membantu peneliti dalam pengumpulan data penelitian melalui pengamatan langsung mengenai fenomena yang terjadi, khususnya berkaitan dengan implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam Sugiyono, (2009:231). Penelitian ini, menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan *interview guide*/pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kemudian informasi yang didapatkan oleh peneliti tersebut dikembangkan selama wawancara berlanjut dan dianalisis setelah melakukan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*, antara lain:

- a. Warga masyarakat Desa Gogodeso
- b. Aparatur Desa Gogodeso
- c. Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Blitar

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dengan cara dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (peraturan perundang-perundangan, surat keputusan, dan ketentuan lain) yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam suatu penelitian, alat pengambil data atau instrumen menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas itu menentukan kualitas penelitiannya, oleh karena itu dalam suatu penelitian instrumen yang digunakan atau dibuat harus cermat. Sugiyono (2009: 222) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Jadi dalam hal ini peneliti merupakan instrumen penelitian, yaitu dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan implementasi

Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu digunakan juga instrumen penelitian sebagai berikut:

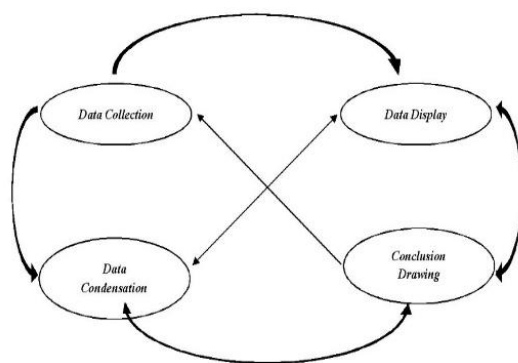
1. Peneliti itu sendiri.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan untuk memperoleh pemaparan yang terkait dengan implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama saat melakukan wawancara.
3. Perangkat penunjang yang meliputi alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data saat penelitian di Desa Gogodeso dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. Sebagai pelengkap penelitian di maka peneliti juga memanfaatkan perekam suara, agar memudahkan dalam melakukan pengolahan data.

#### **G. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah suatu penyelenggaraan ke dalam suatu pola atau bentuk yang tidak mudah untuk diinterpretasikan. Pada penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka analisa data diinterpretasikan dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata atau kalimat. Sehingga analisa data pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah data yang diperoleh dari Desa Gogodeso dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dari di Desa Gogodeso dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif, dimana analisis dengan model interaktif dirasakan lebih cocok digunakan dalam penelitian ini karena aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interkatif dan terus-menerus sampai tuntas sehingga dapat diperoleh hasil pemaparan dari implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya secara utuh. Dimana menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 33), menjelaskan bahwa analisis terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/ Verification*). Adapun skema analisis data model interaktif sebagai berikut:



Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 33

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Merupakan kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menentukan tujuan dari penelitian sesuai dengan jenis dan sifat data yaitu data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya.

### 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Merujuk pada proses pemilihan, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengabstrakkan secara umum sekumpulan informasi yang tersusun serta memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan dari implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses pengolahan data ke dalam sejumlah kategori yang sesuai, yang akhirnya akan memudahkan dalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data. Selain itu, penyajian data juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini memuat gambaran umum dari implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi

permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)

Merupakan tahapan terakhir dalam analisis data interaktif, yaitu data yang telah dikumpulkan, kemudian direduksi untuk memilah-milah data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk mempertajam agar lebih terarah, kemudian dilakukan kondensasi data untuk menyederhanakan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar**

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar Selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang

tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 630.7754 jiwa. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km<sup>2</sup>.

Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing – masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Sebaran Penduduk di Kabupaten Blitar**

Nomor	Kecamatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Bakung	15.090	15.385	30.475
2	Wonotiro	20.701	20.778	41.479
3.	Panggungrejo	22.619	23.360	45.098
4.	Wates	16.949	17.147	34.188
5.	Binangun	24.433	24.755	49.520
6.	Sutojayan	26.277	26.293	52.191
7.	Kademangan	36.328	35.863	72.829
8.	Kanigoro	38.625	39.204	77.370
9.	Talun	33.073	33.297	66.125

10.	Selopuro	22.828	23.297	46.971
11.	Kesamben	29.342	29.629	58.971
12.	Selorejo	21.621	21.690	43.311
13.	Doko	22.729	22.880	45.609
14.	Wlingi	29.484	29.657	59.141
15.	Gandusari	37.957	38.062	76.019
16.	Garum	34.427	33.873	68.300
17.	Nglegok	38.114	38.388	76.702
18.	Sanankulon	28.597	28.951	57.548
19.	Ponggok	51.493	52.590	104.083
20.	Srengat	33.164	33.615	66.779
21.	Wonodadi	25.255	26.219	51.474
22.	Udanawu	21.719	22.284	44.003
	Jumlah	630.755	637.419	1.268.194

Sumber: *blitarkab.bps.go.id*

## 2. Gambaran Umum Desa Gogodeso

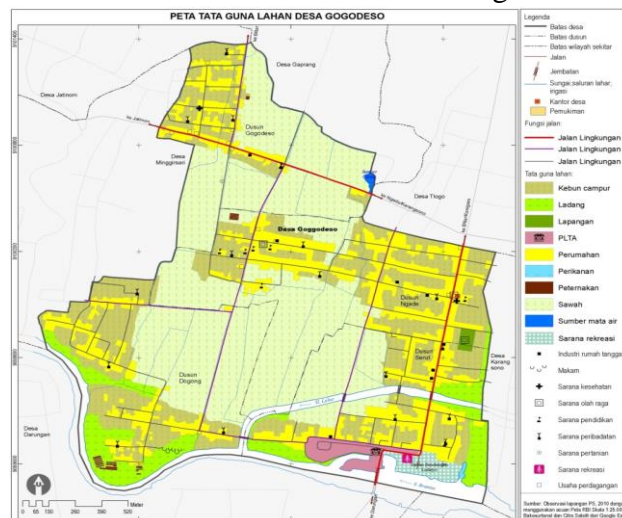
Secara geografis Desa Gogodeso terletak pada posisi  $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$  BT dan  $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$  LS. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 300 m di atas permukaan air laut. Letak Desa Gogodeso berada diantara 12 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Kanigoro dan kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Adapun batas desa tersebut adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Jatinom dan Minggirsari  
Kec. Kanigoro
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Karangsono Kec. Kanigoro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Darungan Kec. Kademangan
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Gaprang dan Tlogo Kec.  
Kanigoro

Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan adalah 6 km memakan waktu tempuh ke kecamatan selama 15 menit sedangkan jarak tempuh ke ibu kota

kabupaten adalah 7 km dan memakan waktu tempuh ke kabupaten selama 20 menit dan tersedia angkutan umum setiap hari.

Gambar 4. Peta Administrasi Desa Gogodeso



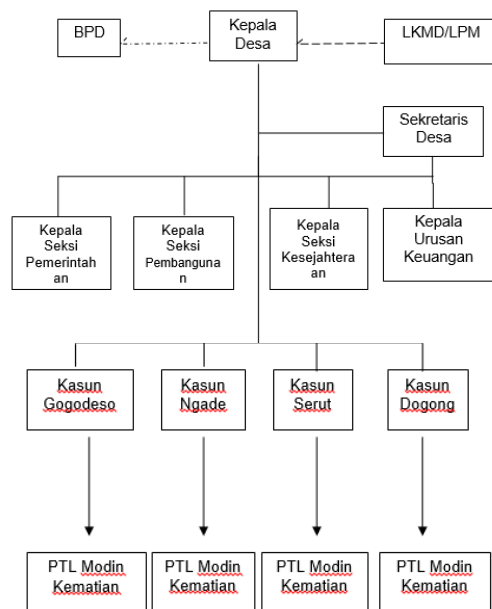
Sumber: *Dokumen profil Desa Gogodeso (2016: 14)*

Desa Gogodeso merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 383 ha. Dimana seluas 164 ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering & areal persawahan. Wilayah Desa Gogodeso dilewati Sungai Brantas sepanjang 1,5 km. Iklim Desa Gogodeso berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar tahun 2013 memiliki curah hujan dengan rata-rata mencapai 240 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Gogodeso adalah terdiri dari 1700 KK, dengan jumlah total 5856 jiwa, dengan rincian 2921 laki-laki dan 2934 perempuan. Wilayah Desa Gogodeso terdiri dari 4 Dusun yaitu : I. Dusun Gogodeso, II. Dusun Ngade, III. Dusun Serut, IV. Dusun Dogong, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparaturnya tersebut. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Gogodeso dari Keempat dusun tersebut terbagi menjadi 13 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT).

Struktur Pemerintahan di Desa Gogodeso dalam pengelolaannya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gogodeso

Sumber: *Dokumen profil Desa Gogodeso (2016: 12)*

#### Keterangan

- .-.-.-.- = Hubungan konsultatif Kades dan BPD
- .-.-.-.- = Hubungan kemitraan Kades dan LKMD/LPM
- = Hubungan Kades dan Perangkat Desa

Selanjutnya struktur pejabat dalam pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa dari Desa Gogodeso yang bertugas aktif adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Pejabat Pemerintah Desa Gogodeso**

No	Nama	Jabatan
1	Choirul Anam, S. Ag	Kepala Desa
2	Regina Yuwanita	Plt. Sekretaris Desa
3	Regina Yuwanita	Kepala Urusan Pemerintahan
4	Khotib Rifai	Kepala Urusan Ekobang
5	Sugandi Rahayu	Kepala Urusan Keuangan
6	Salam Yunus	Kepala Urusan Kesejahteraan
7	Pamuji Lestari	Kasun Gogodeso
8	Slamet	Kasun Ngade
9	Suyitno	Kasun Serut
10	Suliyanto	Kasun Dogong

Sumber: *Dokumen profil Desa Gogodeso (2016: 13)*

**Tabel 4. Badan Permusyawaratan Desa**

No	Nama	Jabatan
1	Fajaruddin	Ketua
2	Arif Jaelani	Sekretaris
3	Nurul Farida	Bendahara

Sumber: *Dokumen profil Desa Gogodeso (2016: 13)*

### **3. Kampung KB Dusun Gogodeso**

Kampung KB Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, adalah inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di Kabupaten Blitar. Kampung KB Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro merupakan bentuk/model miniature pelaksanaan total Program KKBPK yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan

Kementerian/ Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah di Kabupaten Blitar. Definisi Kampung KB pada “Kamus Istilah Kependudukan dan KB” yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (2011: 53): “Kampung KB adalah salah satu upaya

Penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Adapun bagan dari Kebijakan Kampung KB adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Bagan Kebijakan Kampung KB (Juknis Kampung KB, 2015: 6)

Kampung KB Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro melaksanakan program KKBPK dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan di tingkat pemerintah terendah. Kampung KB Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan

diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pembentukan Kampung KB Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro telah memenuhi kriteria utama wilayah yang memiliki jumlah Pra KS dan KS-1 (miskin) diatas rata-rata tingkat desa/ kelurahan di Kabupaten Blitar, dan jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Blitar.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Sebagai langkah dalam penyajian data, pada tahap ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian berlangsung, selanjutnya hasil temuan di lapangan akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar**

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.



### a) Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan menurut George C. Edward III dalam Winarno (2012: 177) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar dalam implementasi Kebijakan Kampung KB pada desa Gogodeso di Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, Kepala Desa Gogodeso.

Bapak Chairul Anam S. Ag selaku kepala desa Gogodeso pada implementasi kebijakan kampung KB.

“Kebijakan kampung KB pada pengimplementasian komunikasi pada masyarakat untuk melakukan sosialisasi Kebijakan kampung KB dalam membahas hal-hal teknis pada pelaksanaan Kebijakan tersebut. Kepala desa hanya sebagai struktur bagan pemerintah daerah untuk melaksanakan Kebijakan secara efektif agar tercapai. Keterlibatan kepala desa dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat untuk meyakinkan bahwa pentingnya Kebijakan kampung KB untuk mengatasi permasalahan kependudukan.”

( Sumber : *Wawancara, Senin 17 Juli 2017 Pukul 10.15 WIB*)

Untuk mengkomunikasikan Kebijakan Kampung KB ini kepada masyarakat maka dalam penyampaiannya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami tujuan implementasi kebijakan kampung KB, selaku Kasun ibu Pamuji Lestari menjelaskan bahwa :

“proses kebijakan kampung KB tersebut dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat untuk melaksanakan Kebijakan serta meyakini masyarakat bahwa implementasi kebijakan kampung KB untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Berjalannya Kebijakan kampung KB tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat desa. Sehingga masyarakat dapat memahami implementasi kebijakan kampung KB ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri”.

( Sumber : *Wawancara, Senin 17 Juli 2017 Pukul 13.12 WIB*)

Melalui komunikasi perangkat desa melakukan kebijakan kampung KB secara efektif pada pelaksanaan. pelaksanaan program ini dibawah tanggungjawab Kepala desa Gogodeso dikendalikan oleh kasun yang telah dijelaskan diatas. Pada setiap perangkat desa Gogodeso terkait ditunjuknya salah satu bidang khusus untuk melaksanakan kebijakan kampung KB ini. Artinya bahwa seluruh struktur perangkat desa tersebut bertanggungjawab penuh pada berjalannya program. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa Gogodeso Bapak Chairul Anam, S.Ag yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan kampung KB ini dari dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mempunyai kewenangannya, pelaksanaan ini dibeikan kepada kepala desa Gogodeso kabupaten Blitar. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat sekitar dan seperangkat kepala desa Gogodeso. Artinya kami disini bertanggungjawab penuh agar pelaksanaan kebijakan kampung KB dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan”.

(Sumber : *Wawancara, Senin 17 Juli 2017 Pukul 10.20 WIB*)

Berdasarkan wawancara diatas, pelaksanaan kebijakan kampung KB ini dibawah tanggung jawab kepala desa Gogodeso dan BKKBN melalui dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang telah disebutkan diatas. Pada setiap perangkat desa ditunjuk salah satu bidang khusus untuk melaksanakan kebijakan ini/ artinya bahwa seluruh struktur organisasi bidang yang telah ditunjuk tersebut bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ini dilaksanakan oleh kabid KB, kepala desa, dan kasun. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Yuhanit Setyani ketua bidang KB menyatakan :

“Dengan tanggung jawab pada dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, telah diamanahkan secara jelas sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan kebijakan yang telah disesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Melalui kebijakan kampung KB ini, sasaran dalam meningkatkan

kualitas kebijakan kampung KB yang melibatkan masyarakat diharapkan dapat memenuhi target dengan baik”

(Sumber: Wawancara Senin 24 Juli 2017 Pukul 10.23 WIB)

Uraian diatas yang dimaksud komunikasi dalam implementasi kebijakan Kampung KB amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Dusun Gogodeso dapat dideskripsikan sebagai berikut

a. Transformasi

Transformasi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi kebijakan kampung KB. Winarno (2012: 178), “Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula”. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transformasi pada implementasi kebijakan kampung KB dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berkerjasama dengan Pemerintah Desa Gogodeso. Tugas tersebut berupa implementasi kebijakan kampung KB dalam upaya mengatasi permasalahan kependudukan. Ibu Yuhanit Setyani Selaku Kepala Bidang KB dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana menyatakan bahwa :

“Kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mentransformasikan kepada masyarakat khususnya desa Gogodeso lebih peduli pada KB. Kebijakan ini jelas mendukung penuh, terlebih lagi kepala desa ditunjuk menjadi *leading sector*. Setelah surat keputusan nomor 188/325/409.06/KPTS/2016 Bupati Blitar untuk membahas hal-hal teknis kebijakan ini.”

(Sumber: Wawancara, Senin 24 Juli 2017 Pukul 10.12 WIB)

Transformasi dalam implementasi kebijakan kampung KB di Kabupaten Blitar berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah Daerah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. Komunikasi dalam implementasi kebijakan kampung KB dilakukan pada saat rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan kebijakan kampung KB diawali dengan transformasi informasi melalui sosialisasi di Dusun Gogodeso oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang termasuk dalam Tim Kampung KB Desa Gogodeso yang sebelumnya telah mendapatkan Pelatihan di Balai Diklat KKB Malang, kemudian kegiatan ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait.

Menurut Chairul Anam selaku Kepala Desa Gogodeso, mengatakan bahwa “Transformasi informasi melalui sosialisasi di tingkat Desa dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 bertempat di Kantor Desa Gogodeso dan dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, Ketua RW, Ketua RT, PKB/PLKB/TPD, Petugas Lapangan sektor terkait, PKK Tingkat Kanigoro dan menghasilkan kesepakatan bahwa Dusun Gogodeso sebagai *pilot project* kampung KB”.

(Sumber: Wawancara, Senin 17 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB)

Hal yang serupa dikemukakan juga oleh Ibu Pamuji Lestari, kasun di desa Gogodeso.

“Tahapan pelaksanaan kebijakan kampung KB ini, biasanya kalau transformasi untuk kebijakan kampung KB penanganannya pada perempuan usia subur yang telah menikah. kita itu mengadakan yang namanya sosialisasi

terhadap masyarakat desa Gogodeso. Jadi, masing-masing perempuan desa Gogodeso dapat memahami kebijakan kampung KB tersebut. Secara sosial kebijakan ini juga turut membantu dalam permasalahan kependudukan, turun ke desa Gogodeso”.

(Sumber: Wawancara, Senin 17 Juli 2017 Pukul 13.30 WIB)

Adapun foto kegiatan dari sosialisasi kebijakan kampung KB sebagai berikut:

Gambar 7. Sosialisasi Kampung KB di Desa Gogodeso



Sumber: *Dokumentasi Pemerintah Desa Gogodeso (2016)*

Kepala Bidang bagian KB Ibu Yuhanit Setyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengatakan “Sosialisasi ini bertujuan untuk pemberitahuan secara langsung yang ditujukan kepada masyarakat Dusun Gogodeso yang diselenggarakan mulai dari perencanaan sampai dengan penganangan”. Hal ini dilakukan agar masyarakat Dusun Gogodeso dapat benar-benar memahami inti dari implementasi kebijakan kampung KB serta mencermati perbedaan dari kebijakan KB sebelumnya. Selain itu, transformasi informasi membantu para *stakeholder* terkait dalam mengidentifikasi permasalahan dan menyusun strategi implementasi kebijakan kampung KB untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso.

## b. Kejelasan

Edward III dalam Winarno (2012: 178), komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada implementasi Kebijakan kampung KB, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka Kelompok Kerja (POKJA) dan kelompok Kegiatan (POKTAN) yang masuk dalam tim penyelenggaraan kebijakan kampung KB harus mengidentifikasi permasalahan kependudukan yang terjadi sehingga diperoleh data yang kredibilitasnya terjamin. Faktor kejelasan dalam hal ini ditujukan untuk masyarakat Dusun Gogodeso sehingga dapat memperoleh manfaat dari implementasi kebijakan kampung KB. Adapun hasil dari pendataan permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Teridentifikasi adanya kepemilikan akta kelahiran yang cukup rendah sekitar 56% dimana angka ini masih rendah dibawah standar nasional, yakni 75%;
2. Adanya usia menikah yang belum ideal sejumlah 17% dimana standar ideal menikah adalah usia lebih dari 21 tahun;
3. Teridentifikasi pada usia wajar dan usia produktif masih rendah dalam tingkat pendidikan. Pada usia wajar dijumpai sekitar 77% anak belum menamatkan pendidikan Dasar SD/MI, dan pada usia produktif sekitar 7% standar pendidikannya hanya setara Dasar SD/MI dan belum menamatkan pendidikan wajar 9 tahun;
4. Dijumpai janda sejumlah 7% dan terindikasi memiliki pendapatan rendah sekitar 30%;

5. Dari 208 Pasangan Usia Subur (PUS) Dusun Gogodeso sekitar 0,48% yang dibawah usia 20 tahun. Sementara sekitar 55% merupakan PUS bukan peserta KB aktif dan hanya sekitar 44% sebagai PUS peserta KB aktif;
6. PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut *unmetneed*. Dalam hal ini di Dusun Gogodeso dijumpai kondisi *unmetneed* sejumlah 24%. Dari jumlah tersebut sekitar 68% teridentifikasi Ingin Anak Ditunda (IAT) dan 32% Tidak Ingin Punya Anak (TIA)
7. Di Dusun Gogodeso Keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita sejumlah 90 KK. Jumlah tersebut sekitar 94 ikut serta dalam kegiatan Posyandu maupun kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
8. Di dusun Gogodeso kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) maupun Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dijumpai kondisi belum ada sama sekali. Dari 257 remaja dan 200 keluarga remaja terindikasi belum melaksanakan kegiatan PIK Remaja maupun BKR.
9. Lansia di dusun Gogodeso sebagian besar adalah para orang tua yang kurang memahami masalah kesehatan di usia lanjut. Mayoritas lansia yang tamat SD sekitar 46% dan lansia yang bekerja pada sektor jasa informal (buruh tani, kuli bangunan) sekitar 42%. Program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terlaksana diikuti sekitar 53% dan sekitar 47% masih belum mengikuti;

10. Dusun Gogodeso dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dijumpai bahwa sekitar 1,4% perempuan yang berpartisipasi dalam UPPKS.

Berdasarkan hasil data di atas, selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) melaksanakan koordinasi pada tanggal 15 Maret 2016 di rumah Kepala Dusun untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelesaian masalah masalah yang dijumpai. Hasil koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kepemilikan akta kelahiran yang cukup rendah sekitar 56% maka perlu diadakan sosialisasi dan fasilitasi pembuatan akta gratis kepada warga dengan target pencapaian 100% untuk warga usia dibawah 18 tahun.
2. Adanya usia menikah yang belum ideal sejumlah 17% maka perlu dilakukan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan secara bertahap kepada para remaja dan keluarga remaja tentang kesehatan reproduksi. Target yang diharapkan keberlangsungan kegiatan BKR dan terbentuknya PIK Remaja berjalan secara berkelanjutan dengan jangkauan remaja yang terlibat mencapai 80%.
3. Adanya usia wajar dan usia produktif masih rendah dalam tingkat pendidikan maka perlu dilakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama kepada usia wajar yang belum sekolah untuk difasilitasi dan dipendampingan untuk dapat mengenyam pendidikan dasar; sedangkan pendekatan kedua diarahkan kepada usia produktif (< 40 tahun) untuk mampu mengikuti pendidikan Paket C dan Paket B. Target yang diharapkan adalah penurunan jumlah usia wajar tidak sekolah mencapai 100%.



4. Adanya janda sejumlah 7% dan terindikasi memiliki pendapatan rendah sekitar 30% dan sekitar 98,6% perempuan belum tidak terlibat dalam kegiatan UPPKS. Dalam hal ini perlu dilakukan intervensi pembinaan dan pembentukan kelompok dengan target terbentuk kelompok UPPKS baru dan perempuan menikah maupun janda yang bekerja masuk dalam keanggotaan UPPKS sampai dengan 80%.
5. Adanya 55% PUS bukan peserta KB aktif perlu dilakukan intervensi berupa sosialisasi, pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap PUS IAT dan PUS TIA.
6. Adanya Balita yang tidak terlibat dalam kegiatan Posyandu, maka keluarga Balita ditargetkan bertahan sampai 97% untuk berpartisipasi dalam Posyandu maupun kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
7. Program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang belum diikuti oleh lansia maupun keluarga lansia ditargetkan meningkat menjadi 80% sampai dengan Desember 2016.

c. Konsisten

Edward III dalam Winarno (2012: 178), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.

Konsistensi dalam implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso merujuk pada dasar hukum penetapan Kebijakan kampung KB. Berdasarkan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Keluarga Berencana yang menjelaskan bahwa pengertian Keluarga Berencana adalah peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Selanjutnya adalah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana yaitu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa Gogodeso Bapak Chairul Anam, S.Ag yang menyatakan bahwa:

“Pada tahap pelaksanaan kebijakan kampung KB ini, Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, (BKKBN), dan kepala desa Gogodeso secara konsisten kebijakan kampung KB berjalan sesuai dengan rencana. Itu nanti diidentifikasi terlebih dahulu untuk mengungkap permasalahan kependudukan melalui latar belakang masyarakat desa Gogodeso. Setelah itu dilakukan tahap-tahap secara konsisten mengenai permasalahan kependudukan melalui prosedur yang direncanakan pada kebijakan kampung KB”.

(Sumber: *Wawancara Senin, 17 Juli 2017 Pukul 10.47 WIB*)

Konsistensi dari implementasi Kebijakan kampung KB di Kabupaten Blitar ditujukan untuk peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat. Sehingga tujuan utama Kebijakan kampung KB adalah meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi yang dijalankan berupa meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Hal ini senada dengan Bapak Chairul Anam, S.Ag dalam implementasinya, program yang dijalankan

harus mengadaptasi dari program keluarga berencana; program pengembangan sistem informasi data keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan program advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Ibu Yuhanit Setyani juga menyatakan bahwa:

“Kampung KB merupakan program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar pada awal tahun 2016 untuk menanggulangi permasalahan kependudukan secara umum dan inovasi dalam menciptakan terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial”.

(Sumber: *Wawancara Senin, 24 Juli 2017 Pukul 10.34 WIB*)

Kampung KB mengintegrasikan program KKBPK dengan kerangka kerja lebih terarah untuk memastikan langkah-langkah kegiatan, serta memastikan indikator dan target/sasaran yang dapat dicapai dengan pendekatan akses dan kualitas pelayanan. Melihat perkembangan kependudukan di Kecamatan Kanigoro tahun 2015, khususnya dalam masalah pendapatan, perkawinan usia kurang dari 20 tahun dan tingkat kesertaan masyarakat dalam Keluarga Berencana. Hal ini tampak bahwa Desa Gogodeso, khususnya Dusun Gogodeso memiliki kecenderungan yang cukup signifikan untuk ditetapkan sebagai *pilot project* Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. Ibu Yukhanit Setyani selaku Kabid bagian KB menyatakan bahwa:

“Kepersertaan KB di Desa Gogodeso cukup rendah, sekitar 49%, sementara dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sekitar 79% dan kecenderungan menikah pasangan usia subur (PUS) yang usia kurang dari 20 tahun mencapai 50%. Dari keempat Dusun di Desa Gogodeso, Dusun Gogodeso dalam masalah kesertaan KB cukup rendah, sekitar 36%, sementara dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sekitar 56% dan kecenderungan menikah PUS yang usia kurang dari 20 tahun mencapai 40%”.

(Sumber: *Wawancara Senin, 24 Juli 2017 Pukul 11.00 WIB*)

Berdasarkan data sampai dengan bulan Februari 2016 bahwa Dusun Gogodeso memiliki masalah kesertaan KB cukup rendah, sekitar 36%, sementara dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sekitar 56% dan kecenderungan menikah PUS yang usia kurang dari 20 tahun mencapai 40% seperti pada tabel berikut:

RT/RW	Rumah Tangga	KK	Jiwa	PUS	Peserta KB	Bukan Peserta KB
RT. 01 RW. 01	38	45	130	19	16	13
RT. 02 RW. 01	46	48	150	26	17	14
RT. 01 RW. 02	53	57	184	42	20	17
RT. 02 RW. 02	49	53	202	49	19	15
RT. 01 RW. 03	34	39	132	24	14	11
RT. 02 RW. 03	29	36	111	26	13	11
RT. 03 RW. 03	45	49	153	35	17	14

Gambar 8. Kondisi Rumah Tangga Dusun Gogodeso

Sumber: *Dokumen profil Kampung KB Dusun Gogodeso (2016: 17)*

Dusun	Rumah Tangga	Rumah Tangga MBR	%	Menikah Menikah usia <20	%	PUS	Peserta KB	Bukan Peserta KB	%
Gogodeso	294	253	86%	5	2	40%	221	116	95

Gambar 9. Kondisi Rumah Tangga Dusun Gogodeso

Sumber: *Dokumen profil Kampung KB Dusun Gogodeso (2016: 17)*

Konsistensi dari implementasi kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/ 325/ 409.06/ KPTS/ 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kampung KB yang dilaksanakan melalui rapat di tingkat Dusun Gogodeso pada hari Selasa, 1 Maret 2016. Dalam Rapat ini dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, Ketua RW, Ketua RT, PKB/PLKB/TPD, Petugas Lapangan sektor terkait, PKK Tingkat Desa/Kelurahan, IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Tokoh Masyarakat. Hal ini Bapak Chairul Anam, S.Ag selaku Kepala Desa Gogodeso Menyatakan bahwa:

“Terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) Kampung KB serta rencana pelatihan kader merupakan langkah awal yang nyata dalam mewujudkan kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso”.

(Sumber: *Wawancara Senin, 17 Juli 2017 Pukul 10.47 WIB*)

POKJA dan POKTAN terbentuk, kemudian dilaksanakan Pelatihan Kader di Rumah Kepala Dusun. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 2 Maret 2016. Hasilnya terlatih kader Kampung KB yang melaksanakan review data basis. Sejumlah 50 orang mengawali kegiatan kampung KB, maka dilakukan penggalan data basis di wilayah Kampung KB untuk mengetahui sejauh mana kondisi Dusun Gogodeso selaku lokasi Kampung KB dalam kaitannya dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat dari sisi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Senada dengan Bapak Chairul Anam, S.Ag, dan Ibu Yuhanit Setyani menyatakan bahwa:

“Kegiatan pendataan dilaksanakan selama 2 (dua) minggu sejak dilatihnya kader Kampung KB dengan bantuan anggaran dari Pemerintah Desa Gogodeso sampai akhir minggu ke 2 bulan Maret 2016 rekapitulasi hasil pendataan Kampung KB sudah selesai”.

(Sumber: *Wawancara Senin, 24 Juli 2017 Pukul 11.24 WIB*)

Hasil dari identifikasi permasalahan kependudukan melahirkan program prioritas yang harus konsisten dan diterapkan di Kampung KB, adapun program prioritas antara lain sebagai berikut:

1. Program Akta Gratis;
2. Program Pendewasaan Usia Perkawinan;
3. Program Tamat Wajar;

4. Program Perempuan Godes Jaya;
5. Program PUS Sehat;
6. Program Balita Aktif;
7. Program Lansia Sehat.

Kesimpulan dari penyajian data di atas adalah keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab. Proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap target dan sasaran implementasi Kebijakan kampung KB. Implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso melibatkan Kepala Desa, BPD, LPMD, Ketua RW, Ketua RT, PKB/PLKB/TPD, Petugas Lapangan sektor terkait, PKK Tingkat Desa/Kelurahan, IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Tokoh Masyarakat, Kader, Bupati yang dalam praktiknya telah menerapkan prinsip komunikasi yang baik.

#### **b) Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan *skill* (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana implementasi kebijakan kampung KB itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam, Winarno

(2012: 177). Sumber daya di sini dibedakan menjadi empat yaitu berupa sumber daya manusia (staff), anggaran (keuangan), non manusia (fasilitas, peralatan atau sarana prasarana) dan sumber daya informasi dan kewenangan. selaku kabid Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ibu Yuhanit Setyani menjelaskan bahwa:

“Mengetahui Sumber daya Pada tahap pelaksanaan kebijakan kampung KB ini, Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, (BKKBN), dan kepala desa Gogodeso secara konsisten kebijakan kampung KB berjalan sesuai dengan rencana dengan tujuan kepada masyarakat Gogodeso. Nantinya masyarakat Gogodeso tersebut dengan penyuluhan dan pelatihan terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan kependudukan masyarakat desa Gogodeso”.

(Sumber: *Wawancara Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 09.45 WIB*)

#### a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso memiliki sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai bidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Bapak Chairul Anam S.Ag selaku Kepala desa Gogodeso menyatakan bahwa:

“ Sumber daya Manusia Pada pelaksanaan kebijakan kampung KB ini, Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, (BKKBN), dan kepala desa Gogodeso sesuai dengan rencana yang dilakukan dengan tujuan kepada

masyarakat Gogodeso untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai program tersebut. Masyarakat Gogodeso tersebut dengan kelayakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kependudukan”.

(Sumber: *Wawancara Selasa, 18 Juli 2017 Pukul 10.05 WIB*)

Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan Kebijakan kampung KB adalah Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang berperan sebagai implementator yang memberikan sosialisasi kebijakan kampung KB serta mengedukasi, membimbing, dan mediator pada proses pencapaian tujuan Kampung KB. Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) adalah ujung tombak keberhasilan perubahan masyarakat Dusun Gogodeso dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Maka Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) telah memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal kesamaan pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap Kebijakan kampung KB tersebut.

#### b. Sumber daya anggaran (keuangan)

Pelaksanaan Kebijakan kampung KB Dusun Gogodeso dicanangkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 yang dihadiri oleh Bupati Blitar Drs. H. Rijanto beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar Ninik Rijanto. Dalam implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso mendapatkan alokasi sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Bantuan Operasional KB (BOKB) yang bertujuan menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga. Pemanfaatan dana BOKB diperuntukan untuk membiayai



pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Kampung KB. Selain itu adapun sumber pendanaan lainnya dari bantuan APB Desa Gogodeso.

c. Sumber daya non manusia (fasilitas, peralatan atau sarana prasarana)

Sumber daya non manusia meliputi fasilitas yang memadai, peralatan atau ketersediaan sarana dan prasana. Menurut Edward III, Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam implementasi kebijakan kampung KB berupa ketersediaan lokasi penyuluhan kebijakan kampung KB, media penyuluhan, dan obat-obatan. Bapak Mukhlis Menyatakan bahwa:

“Bahwa program kampung ini masyarakat masih banyak mengeluhkan masalah sarana dan prasarana seperti tempat,waktu, dan konsumsi. Terkadang untuk penempatan masih menumpang dirumah tetangga dan belum memiliki fasilitas yang layak untuk dilakukannya program tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyampaian kebijakan kampung KB ini dikarenakan menggunakan fasilitas proyektor dan buku panduan mengenai kebijakan kampung KB”.

(Sumber: *Wawancara Selasa, 18 Juli 2017 Pukul 15.05 WIB*)

Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan kampung KB. Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi kebijakan kampung KB kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana

prasarana seperti tempat penyuluhan dan media pendukung lainnya yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan kampung KB.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan kebijakan kampung KB. Sumber informasi diperoleh dari masyarakat dan pemerintah Desa Gogodeso. Sedangkan kewenangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) dalam menyusun kebijakan kampung KB untuk mengentaskan permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso. Adapun program prioritas Kampung KB yang ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Program Akta Gratis;
2. Program Pendewasaan Usia Perkawinan;
3. Program Tamat Wajar;
4. Program Perempuan Godes Jaya;
5. Program PUS Sehat;
6. Program Balita Aktif;
7. Program Lansia Sehat.

Kewenangan penyusunan kebijakan kampung KB, Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) turut melakukan pembinaan dan pemantauan. Kegiatan pembinaan dan pemantauan utamanya difokuskan pada PUS IAT dan PUS TIA. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan kepada BKR dan BKL setiap Triwulan. Ibu Yuhanit Setyani selaku Kabid Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana menyatakan bahwa:

“Selama kurun hampir 16 bulan kegiatan Kampung KB terus berlangsung, dan telah menghasilkan banyak hal kepada masyarakat, baik pemahaman, perubahan perilaku dan tentunya kesadaran masyarakat akan arti penting keluarga berencana dan keluarga sejahtera”.

(Sumber: *Wawancara Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 09.43 WIB*)

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas memerlukan dukungan penuh, khususnya Pemerintah Desa Gogodeso dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada tataran teknis juga memerlukan berbagai inovasi kegiatan dalam kerangka sosialisasi maupun pembinaan. Menurut Ibu Yukhanit Setyani mengatakan bahwa “Terlaksananya kegiatan yang ada bukan hal yang mudah”. Kegiatan yang lahir dari informasi dan kewenangan yang dimiliki oleh Pokja dan Poktan yang telah terselenggara adalah sebagai berikut:

#### 1. Gubug Sarasehan Baju Kencana

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi KB yang dibungkus dalam kegiatan seni. Di sela-sela acara kesenian berlangsung, diisi dengan penyampaian program oleh PPKB, Kepala Dusun, Babinsa dan Babinkamtibmas. Secara umum hasil yang disampaikan telah memberikan motivasi masyarakat untuk memakai alat KB dan sebagian PUS mulai berpartisipasi aktif dalam KB.

#### 2. Pokdara Kencana (Kelompok Sadar Nusantara menuju KB)

Kegiatan ini berbentuk arisan tokoh agama yang sadar KB dan sadar NKRI. Dalam arisan ini juga dilaksanakan pembahasan masalah-masalah masyarakat yang berkaitan dengan kependudukan dan Keluarga Berencana.

Narasumber utama diantaranya tokoh agama, Kasun, PPKB, Babinsa dan BABINKAMTIBMAS. Hasil yang diharapkan adalah peran para tokoh agama dalam ikut mensosialisasikan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana kepada masyarakat luas di Dusun Gogodeso.

### 3. Arda Samawa Kencana (Arisan Pemuda Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Keluarga Berencana)

Kegiatan ini merupakan kegiatan arisan kelompok remaja, yang di dalamnya juga diselengi dengan sosialisasi penyampaian informasi masalah KB dan kesehatan. Narasumber dalam kegiatan ini adalah PPKB, Guru setempat, tokoh pemuda dan tokoh ormas.

### 4. Yasinan TRIBINA

Masyarakat dusun Gogodeso masih lekat dengan nuansa desa yang agamis. Salah satu kegiatannya adalah perkumpulan yasinan yang diikuti oleh seluruh warga. Yasinan ini diselenggarakan berdasarkan jenis kelamin. Bagi kaum laki-laki yasinan dilaksanakan pada Kamis Malam Jum'at pada setelah waktu maghrib (sekitar pukul 18.00 WIB s.d 20.00). Bagi kaum perempuan pada hari Jum'at siang (sekitar pukul 13.00 WIB s.d 17.00 WIB). Peserta yang mengikuti dari berbagai kalangan, para lansia, PUS maupun remaja. Dengan adanya yasinan ini, menjadi salah satu media yang efektif bagi kader Kampung KB untuk berperan aktif menyampaikan berbagai hal tentang KB. Sebagian kader mendapat kesempatan menyampaikan pesan KB sebelum acara inti dimulai, namun ada juga yang diberi kesempatan usai acara inti.

## 5. Gebyar Produk Unggulan UPPKS

PUS Dusun Gogodeso adalah para perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai pembuat makanan olahan yang mendukung industri makanan olahan yang saat ini pasarnya cukup berkembang pesat di Kabupaten Blitar. Namun saat ini mereka adalah individu yang belum membentuk kelompok dan rentan mengalami masalah terhadap pengelolaan modal. Guna merangsang para perempuan produktif ini, maka dilaksanakan Gebyar Produk Unggulan UPPKS dengan harapan agar mereka mau menjadi anggota kelompok maupun membentuk kelompok baru.

Kesimpulan dari penyajian data di atas adalah sumber daya kebijakan kampung KB meliputi empat kriteria utama yaitu (1) Sumber daya manusia (staff) yang dalam prosesnya sangat menentukan ketercapaian target dan sasaran kebijakan kampung KB, (2) Anggaran (keuangan) yang berasal dari dana pemerintah daerah serta APB Desa Gogodeso dan dalam implementasinya Kebijakan kampung KB memiliki 6 program prioritas yang harus dicapai oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan), (3) Non manusia (fasilitas, peralatan atau sarana prasarana) dan (4) Sumber daya informasi dan kewenangan yang melahirkan lima inovasi kegiatan dalam mengiringi implementasi kebijakan kampung KB dan telah menciptakan kemajuan yang signifikan dalam kaitannya mewujudkan penanggulangan permasalahan kependudukan dan selama 16 Bulan Kebijakan kampung KB telah mengintegrasikan dan menciptakan inovasi program KKBPK di Dusun Gogodeso.

### c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Menurut George C. Edward III dalam, Winarno (2012: 178) kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila

implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Peneliti menemukan sikap disposisi dalam implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Chairul Anam selaku Kepala Desa Gogodeso yang menyatakan bahwa:

“Pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Desa Gogodeso dan pihak terkait (LSM, masyarakat) selalu mendukung dan siap untuk melaksanakan dan menjalankan Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso sebagai langkah awal inovasi pengentasan permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso”.

(Sumber: *Wawancara Selasa, 18 Juli 2017 Pukul 10.15 WIB*)

Pelaksana kebijakan dalam implementasi Kebijakan kampung KB menunjukkan adanya citra positif dari Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) demi mewujudkan tujuan dari pencanangan Kampung KB di Dusun Gogodeso. Sikap positif tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan 7 program prioritas Kampung KB dan strategi pengentasan permasalahan yang dihadapi, adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

#### 1. Program Akta Gratis

Program Akta Gratis adalah program untuk mengentaskan permasalahan kependudukan yang erat kaitannya dengan proses administrasi kependudukan agar setiap individu mempunyai legalitas hukum akan identitas diri dan diakui oleh Negara. Sasaran program ini adalah anak usia <15 tahun. Strategi yang dilakuna

adalah dengan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi sampai anak-anak usia < 15 tahun Dusun Gogodeso memiliki akta kelahiran.

Sampai dengan Desember 2016 bahwasanya dari 228 anak usia <15 tahun telah memiliki akta kelahiran. Dari jumlah total penduduk Dusun Gogodeso kepemilikan akta ini mengalami peningkatan dari 56% menjadi 76% atau naik 10 point. Menurut Chairul Anam selaku Kepala Desa Gogodeso “Program Akta Gratis sangat membantu masyarakat miskin yang kesulitan dalam mengurus akta kelahiran untuk anaknya dan mendapat apresiasi positif”. Sedangkan menurut Yukhanit Setyani “Program Akta Gratis mendorong masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran agar mau mengurus ke Kantor Desa Gogodeso”.

## 2. Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program pendewasaan usia perkawinan merupakan program untuk menciptakan usia perkawinan yang matang demi menghindari perkawinan ilegal serta memberikan edukasi kepada pasangan dibawah umur agar tidak melakukan kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan kesiapan dalam memiliki anak. Sasaran Program ini adalah keluarga yang mempunyai anak usia 7-21 tahun. Strategi yang diterapkan melalui Sosialisasi dan Diskusi Terarah.

Pada awal program kegiatan ini tidak menjadi minat para remaja maupun keluarganya. Peserta yang hadir pada saat awal kegiatan tidak lebih dari 10 orang. Namun ketika sering dilakukan sosialisasi dan dilaksanakan dialog melalui berbagai forum masyarakat, sebagian besar remaja dan orang tua mulai merasakan manfaatnya. Setidaknya sampai dengan Desember 2016, tidak kurang dari 80%



remaja mengikuti PIK Remaja dan sekitar 65% keluarga remaja berpartisipasi dalam kegiatan BKR.

### 3. Program Tamat Wajar

Program Tamat Wajar adalah program yang dikhususkan untuk mendorong anak-anak usia belajar agar mendapatkan akses pendidikan yang layak selama wajib belajar yaitu 9 tahun. Program ini dirasakan sangat penting karena pengentasan permasalahan kependudukan pada dasarnya dapat dicapai dengan baik jika masyarakatnya mempunyai taraf pendidikan yang baik. Sasaran kegiatan ini adalah usia 7 s.d 14 tahun yang tidak sekolah dan tidak tamat SD/SLTP sederajat.

Harapannya bagi yang tidak sekolah mau bersekolah, sedangkan yang tidak tamat SD/SLTP dapat menyelesaikan sekolah sampai jenjang SLTP. Faktor utama penyebab mereka tidak sekolah adalah faktor lingkungan. Sehingga pendekatan kepada orang tua dalam hal ini sangat penting. Dari hasil sosialisasi, fasilitasi dan advokasi akhirnya dari 89 anak, sekitar 33 anak sudah menyatakan diri bersedia untuk mengikuti Program Kejar Paket A.

### 4. Program Perempuan Godes Jaya

Membangun Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) bukanlah hal mudah. Sebab tantangan terbesar dalam hal ini adalah memahami masyarakat tentang pentingnya berkelompok, menumbuhkan dinamika kelompok, menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi setempat guna memajukan kelompok, termasuk bagaimana menumbuhkan semangat wirausaha pada keluarga.

Pada umumnya sejumlah perempuan PUS di Dusun Gogodeso adalah perempuan yang telah memiliki usaha makanan olahan, baik yang berjalan mandiri maupun sebagai sub sistem usaha makanan olahan yang sudah berkembang. Hanya saja pada umumnya usaha kaum perempuan PUS sebagai sub sistem ini rentan dalam masalah pengelolaan keuangan sehingga pada kurun waktu tertentu sering mengalami hambatan permodalan sebagai akibat lemahnya manajemen dan perencanaan keuangan. Dengan adanya sosialisasi dan dorongan kader Kampung KB, termasuk rangsangan melalui Gebyar Produk Unggulan UPPKS, maka mulai tampak manfaat yang dirasakan para perempuan produktif dalam kegiatan UPPKS. Setidaknya dari hanya 8 orang, sekarang keanggotaan UPPKS mencapai 76.

#### 5. Program PUS Sehat

Program Pasangan Usia Subur yaitu program yang menasar pasangan usia subur agar melakukan kegiatan seksual yang sehat. Program PUS ini dipusatkan pada pasangan yang wanitanya berusia antara 15-49 tahun, karena kelompok ini merupakan pasangan yang aktif melakukan hubungan seksual dan setiap kegiatan seksual dapat mengakibatkan kehamilan. PUS diharapkan secara bertahap menjadi peserta KB yang aktif lestari sehingga memberi efek langsung penurunan angka kelahiran (fertilisasi).

Dusun Gogodeso kondisi PUS yang tidak menjadi peserta KB aktif terdiri dari 1 orang yang pada fase sebaiknya menunda kehamilan, 32 orang direkomendasikan hamil dan 89 orang dalam fase rentan. Menyikapi kondisi ini maka berbagai upaya dilakukan oleh Kader Kampung KB melalui berbagai media yang ada di masyarakat, diantaranya melalui sosialisasi di berbagai forum

yasinan dan arisan. Di samping sosialisasi juga dilakukan pendampingan dan pemantauan agar apabila terjadi kehamilan dapat diantisipasi permasalahan yang muncul. Dengan berbagai upaya tersebut, setidaknya pada akhir 2016 terjadi penurunan jumlah peserta KB tidak aktif dari 46% menjadi 23% atau turun sekitar 23%.

#### 6. Program Balita Aktif

Program Bina Keluarga Balita bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan emosional, dan perilaku sosial, juga merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan kasih sayang dalam keluarga. Layanan Bina Keluarga Balita ini diperuntukkan bagi ibu yang memiliki balita. Para ibu yang memiliki balita mendapatkan penyuluhan sehingga pengetahuan dan ketrampilan ibu dalam mengasuh anak akan meningkat.

Dusun Gogodeso umumnya keterlibatan keluarga balita dalam Posyandu dan BKB hanya sampai anak memasuki masa sosialisasi. Ketika anak sudah memasuki usia pra sekolah sebagian besar keluarga balita sudah tidak lagi aktif dalam kegiatan Posyandu. Menyikapi hal tersebut Kader Kampung KB melaksanakan berbagai sosialisasi dan pembinaan sekaligus pemantauan ke rumah-rumah terhadap tumbuh kembang balita. Setidaknya dengan kegiatan tersebut beberapa keluarga balita mulai menyadari untuk berpartisipasi dalam Posyandu.

## 7. Program Lansia Sehat

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan BKL adalah meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Kegiatan BKL di Dusun Gogodeso diselenggarakan melalui sosialisai dan pendampingan kepada lansia maupun keluarga lansia, termasuk secara terpadu dalam kegiatan rutin masyarakat. Hasilnya perkembangan lansia yang terlibat dalam Posyandu maupun BKL meningkat.

Kesimpulan dari penyajian data di atas adalah Kebijakan kampung KB memiliki 7 program prioritas yang menuntut Kader Kampung KB baik Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) agar memiliki sifat positif baik dari segi kejujuran serta komitmen sehingga dapat bekerja secara optimal demi mendorong target dan sasaran program. Ke 7 program prioritas tersebut akan dilaksanakan selama kurun waktu 3 tahun dari 2016 sampai 2019 dan diharapkan segala bentuk permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso dapat teratasi sehingga keberhasilan *pilot project* Kampung KB dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menciptakan program serupa yang skalanya lebih luas.

### **d) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan. Petunjuk teknis dalam implementasi Kebijakan kampung KB menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Menurut Edward III, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Pada Implementasi kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso terdapat mekanisme operasional Kampung KB yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dan keputusan Bupati Blitar sebagai produk hukum pembentukan struktur implementator kebijakan kampung KB.

Aspek pertama, mekanisme operasional Kampung KB digunakan sebagai petunjuk teknis dalam implementasi Kebijakan kampung KB. Bekerja atau berfungsinya berbagai langkah operasional Kebijakan kampung KB secara teratur, terencana dan terus-menerus yang satu sama lain saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi Kecamatan Kanigoro, Desa Gogodeso, Dusun Gogodeso, dan RT/RW Desa Gogodeso dalam upaya mencapai sasaran kebijakan kampung KB. Dijelaskan

dalam mekanisme operasional memiliki 3 tahapan utama yaitu *staff meeting*, rapat koordinasi dan sarasehan.

*Staff meeting* merupakan pertemuan intern antar Petugas Lapangan, Kader Kampung KB Dusun Gogodeso, dan Kepala Desa/Kepala Dusun/ Ketua RW Gogodeso untuk membahas hasil analisis dan penilaian operasional, yang bertujuan menyajikan informasi terpilih dan objek yang dapat digunakan pimpinan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pencapaian Kebijakan kampung KB. Pertemuan bersama yang dilakukan rutin setiap bulan supaya gerak operasional dalam implementasi Kebijakan kampung KB di desa Gogodeso dapat disatukan langkah dan beberapa kesepakatan, menghasilkan suasana kerja yang kondusif sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kebijakan kampung KB dan diharapkan dapat mengentaskan permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso. Hal ini Ibu Yukhanit selaku Kepala bidang KB Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana menyatakan bahwa:

“*staff meeting* dilakukan untuk melihat perubahan masyarakat dan sebagai bahan evaluasi dalam proses implementasi kebijakan kampung KB. Sehingga untuk kedepannya dapat disempurnakan”.

(Sumber: Wawancara Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 11.45 WIB)

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tingkat Desa yang melibatkan unsur perangkat Desa Gogodeso, PKB/PLKB, para Kader Kampung KB, PPKBD/ sub PPKBD, Toga/ Toma, PKK, Karangtaruna serta LSM. Rapat koordinasi diperuntukan untuk pembahasan perkembangan pencapaian dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan kampung KB baik berupa kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Berdasarkan hasil rapat koordinasi

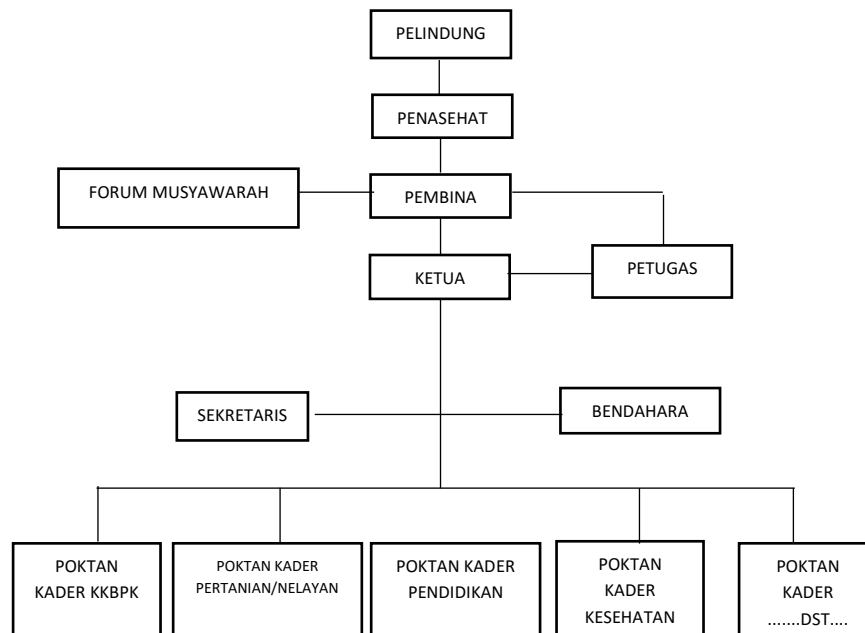
diharapkan akan menghasilkan analisis data dan analisis peta wilayah di Dusun Gogodeso sehingga Pokja dan Poktan dapat melaksanakan rencana kegiatan Program Kampung KB yang disesuaikan dengan kegiatan Desa Gogodeso dalam bentuk kesepakatan keseluruhan peserta pertemuan.

Sarasehan merupakan pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan pendapat atau sasaran dari seorang ahli (Toma/Toga) dalam bidang tertentu untuk memecahkan masalah yang terjadi di Kampung KB. Metode pelaksanaan sarasehan yaitu mengundang seorang ahli (Toma/Toga) dalam bidang tertentu sebagai seorang penyaji, lalu tugas seorang peserta hanya mendengarkan penjelasan dari penyaji, setelah itu dibuka sesi tanya jawab maka peserta boleh menanyakan sesuatu kepada penyaji. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sarasehan adalah permasalahan dari data Desa/Dusun Gogodeso sebagai tempat implementasi Kebijakan kampung KB. Dalam hal ini seorang ahli (Toma/Toga) adalah pemangku kebijakan di Kampung KB sedangkan peserta adalah pengelola Kampung KB dan pelaksanaan sarasehan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.

Aspek kedua, struktur kepengurusan kampung KB ditetapkan melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/ 325/ 409.06/ KPTS/ 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kampung KB, menghasilkan kelompok kerja dan kelompok kegiatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Mengenali dan menganalisa konsep dan implementasi Kampung KB
2. Memahami dan menyajikan konsep kesepakatan rencana aksi Kampung KB
3. Memahami dan memfasilitasi kesepakatan rencana aksi Kampung KB oleh masyarakat
4. Memahami dan memfasilitasi cara pengelolaan kegiatan Kampung KB (dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui sarasehan).

Adapaun struktur pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Struktur Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso

Sumber: *Juknis Kampung KB* (2016: 12)

Selanjutnya struktur pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso yang bertugas aktif adalah sebagai berikut:



<b>SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG KB DUSUN GOGODESO DESA GOGODESO</b>		
<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
Pelindung	: Drs. H. Rijanto, MM	Bupati Blitar
Penasehat	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar
Pembina	: Aan Ernawanto, SE.MM	Camat Kanigoro
Ketua	: Choirul Anam, S.Ag	Kepala Desa Gogodeso
Sekretaris	: Dra. Dyah Marhaeni P.MM	Ka. UPTB PPKB
Bendahara	: Naimatul Munawaroh	Ketua TP PKK Desa Gogodeso
<b>Kelompok Kegiatan</b>		
Forum	: Dyah Maliyawati	PKB
Musyawarah	Sri Sulikah	Bidan Desa
	Imam Nawawi	BPD
	Pamuji	Kepala Dusun
Petugas Lini	: Endah Susilowati, SH.MM	PKB
Lapangan	Pamuji Lestari	TP PKK Dusun Gogodeso
	Siti Rosiyah	PPKBD
BKB	: Mundi Roidah	Kader
BKR	: Sri Ariani	Kader
BKL	: Kimik	Kader
UPPKS	: Sri Wahyuni	Kader
PIK Remaja	: Mohamad Galih Nugroho	Kader

Gambar 11. Susunan Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso

Sumber: *Juknis Kampung KB (2016: 12)*

Struktur kepengurusan tersebut digunakan sebagai Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi pelaksana implementasi kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan. Dalam implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso dapat dilihat dari pembagian tugas pada saat melakukan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan di lapangan. Bapak Chairul Anam selaku Kepala Desa Gogodeso menyatakana bahwa:

” Koordinasi antar pelaksana Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso yaitu melalui kerjasama antara *stakeholder* yang terlibat dalam proses implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso. Melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelakasanaan masing-masing

tugas, Pokja dan Poktan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Blitar. Pada pencaanangan kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan kampung KB sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai”.

(Sumber: *Wawancara Selasa, 18 Juli 2017 Pukul 11.48 WIB*)

Kesimpulan dari penyajian data di atas adalah struktur birokrasi memiliki dua faktor utama yaitu pertama, mekanisme operasional yang disebut sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Kebijakan kampung KB. Kedua, struktur birokrasi yang menunjukkan pembagian kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengurus Kampung KB. Struktur birokrasi sangat penting dalam mencapai sasaran dan target dari Kebijakan kampung KB sehingga dalam tataran mekanisme dan susunan pengurus harus memiliki kompetensi dan kecakapan yang sesuai dengan bidangnya.

## **2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, meliputi:**

### **a) Faktor Pendukung**

#### **1. Partisipasi masyarakat**

Pelaksanaan Kebijakan kampung KB mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat Dusun Gogodeso, hal tersebut dapat terlihat dari antusiasme warga masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang telah dicanangkan oleh Pokja dan Poktan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:



Gambar 12. Partisipasi aktif masyarakat Dusun Gogodeso

Sumber data: *penulis 2017*

## 2. Kemitraan Kampung KB

Kemitraan Kampung KB adalah kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan mitra terkait seperti halnya organisasi keagamaan (Muslimat NU, LKKNU, Aisyiyah, Muhamadiyah, Fapsedu), organisasi kemasyarakatan (PKK, Kowani), organisasi swasta (Apindo dan perusahaan swasta lainnya), organisasi profesi (IBI, IDI, Pogi dll).

Langkah kerjasama dan kemitraan yaitu melakukan penjajakan dengan calon mitra sehingga diperoleh penyamaan persepsi/ negosiasi dan melaksanakan pengaturan peran dari masing-masing pihak (tugas dan tanggung jawab). Setelah tercapainya kesepakatan maka disusun rencana kerja yang digunakan dalam rangka implementasi kegiatan. Selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### **b) Faktor Penghambat**

1. Konsistensi dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang Kebijakan kampung KB (Nama, konsep dan kriteria lokasi) hal ini terjadi karena masyarakat cenderung memahami bahwa tujuan dari Kebijakan kampung KB akan sama dengan Program KB pada umumnya yang hanya menekan angka pertumbuhan penduduk sedangkan Kebijakan kampung KB lebih dari sekedar menekan angka pertumbuhan penduduk melainkan pengentasan permasalahan kependudukan baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Kebijakan kampung KB khususnya dalam hal penyuluhan menggunakan fasilitas seadanya baik dari lokasi di Balai Desa atau rumah kepala dusun.

### **C. Analisis Data**

Analisis data membahas temuan dan hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi kebijakan George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut:

## **1. Implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.

### **a) Komunikasi**

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation* dan dalam studi implementasi kebijakan sangat krusial penerapannya bagi *public administration* dan *public policy* (Winarno, 2012: 177). Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Edward (Winarno, 2012: 177) menyebutkan ada empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Implementasi Kebijakan kampung KB akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dari penetapan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam proses implemenrasi merupakan suatu

proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Implementasi Kebijakan kampung KB berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sehingga tujuan dari Kebijakan kampung KB harus diterima oleh semua pelaksana dan harus dimengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuannya. Jika para implemetor bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi proses dan hasil implementasi Kebijakan kampung KB. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi Kebijakan kampung KB yang akan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Transformasi

Proses penyampaian informasi Kebijakan kampung KB dilakukan oleh pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar tujuan dari Kebijakan kampung KB dapat tertransformasikan secara tepat kepada masyarakat dan para kader Kampung KB. Transformasi dalam implementasi Kebijakan kampung KB di Kabupaten Blitar berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah Daerah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. Transformasi dalam implementasi Kebijakan kampung KB dilakukan pada saat

rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan Kebijakan kampung KB diawali dengan transformasi informasi melalui sosialisasi di Dusun Gogodeso oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang termasuk dalam Tim Kampung KB Desa Gogodeso yang sebelumnya telah mendapatkan Pelatihan di Balai Diklat KKB Malang, kemudian kegiatan ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait.

Pemaparan data diketahui transformasi dilakukan dengan cara rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) tentang Kebijakan kampung KB kepada masyarakat Dusun Gogodeso dan Aparatur Pemerintah Desa Gogodeso yang dilakukan pada saat proses penancangan sampai pada tahap implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso. Maka transformasi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa

kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transformasi pada implementasi Kebijakan kampung KB pada Dusun Gogodeso berjalan baik, karena informasi yang disampaikan oleh Pokja dan Poktan sudah

tepat sasaran. Indikasi dari hal tersebut adalah masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Gogodeso sudah mengetahui tentang adanya kebijakan kampung KB.

#### b. Kejelasan

Berdasarkan data mengenai hasil indikator kejelasan ditujukan pada permasalahan kependudukan yang terjadi di Dusun Gogodeso agar dalam proses komunikasi terjadi kejelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil dan strategi intervensi terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Pada implementasi Kebijakan kampung KB, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka Kelompok Kerja (POKJA) dan kelompok Kegiatan (POKTAN) yang masuk dalam tim penyelenggaraan Kebijakan kampung KB telah mengidentifikasi permasalahan kependudukan yang terjadi sehingga diperoleh data yang digunakan sebagai bahan penyusunan Kebijakan kampung KB.

Faktor kejelasan ditujukan untuk masyarakat Dusun Gogodeso sehingga dapat memperoleh manfaat dari implementasi Kebijakan kampung KB. Dapat dilihat bahwa kejelasan Kebijakan kampung KB sudah baik, hal ini karena para sasaran Kebijakan kampung KB sudah mengetahui adanya pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang selama ini sudah dilakukan.

George C. Edward III menyatakan bahwa jika kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas sampai kesasaran kebijakan. Dapat



disimpulkan bahwa indikator kejelasan pada implementasi Kebijakan kampung KB yang diperuntukan dalam pendataan permasalahan dan penetapan bentuk intervensi kebutuhan dalam penyelesaian masalah masalah yang dijumpai telah dilakukan dengan baik.

#### c. Konsisten

Konsistensi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso utamanya ditujukan untuk mengkomunikasikan berbagai bentuk program yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, Kebijakan kampung KB merupakan langkah yang dipilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam mengatasi permasalahan kependudukan selama ini dan ditetapkan sebagai *pilot project* di Dusun Gogodeso. Konsistensi komunikasi dari implementasi Kebijakan kampung KB di Kabupaten Blitar ditujukan untuk peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat. Sehingga tujuan utama Kebijakan kampung KB adalah meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi yang dijalankan berupa meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Dalam implementasinya, konsistensi komunikasi dalam penerapan program yang dijalankan telah mengadaptasi dari program keluarga berencana; program pengembangan sistem informasi data keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan program advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Konsistensi dilakukan mulai dari tahap proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik sehingga mendorong aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap target dan sasaran implementasi Kebijakan kampung KB.

Selanjutnya dapat dianalisis bahwa dalam penerapannya telah melibatkan Kepala Desa, BPD, LPMD, Ketua RW, Ketua RT, PKB/PLKB/TPD, Petugas Lapangan sektor terkait, PKK Tingkat Desa/Kelurahan, IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Tokoh Masyarakat, Kader, Bupati yang dalam praktiknya telah menerapkan prinsip konsistensi komunikasi yang baik.

Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso, dapat disimpulkan bahwa telah dilaksanakan dengan baik hal tersebut diketahui dari perintah terkait dengan penetapan program yang diberikan telah konsisten. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tataran implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso yang telah konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan. Kondisi yang terjadi telah sesuai dengan pendapat George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

#### **b) Sumber Daya**

Pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada Dusun Gogodeso, peneliti akan menjabarkan kedalam 4 (empat) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Empat indikator tersebut antara lain:

#### a. Sumber Daya Manusia

Merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa “sumber daya manusia, harus cukup (jumlah) dan cakap keahlian”. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (keahlian). Jika sumber daya manusia terbatas dari segi jumlah dan kualitasnya pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kebijakan kampung KB adalah Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang berperan sebagai implementator yang memberikan sosialisasi Kebijakan kampung KB serta mengedukasi, membimbing, dan mediator pada proses pencapaian tujuan Kampung KB. Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) adalah ujung tombak keberhasilan perubahan masyarakat Dusun Gogodeso dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal kesamaan pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap Kebijakan kampung KB tersebut.

Sumber daya manusia dalam implementasi Kebijakan kampung KB telah memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia mempunyai ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya

program kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) mengupayakan agar Kebijakan kampung KB menjadi jembatan dalam memperbaiki permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso. Terlebih dalam membantu pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam menjalankan program inovasi KKBPK dan menciptakan perubahan positif bagi solusidalam mengentaskan permasalahan kependudukan.

#### b. Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Dana digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya anggaran juga akan menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari implementasi kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso, anggaran dalam pelaksanaan kebijakan kampung KB mendapatkan alokasi sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Bantuan Operasional KB (BOKB) yang bertujuan menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Pemanfaatan dana BOKB

diperuntukan untuk membiayai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kampung KB. Selain itu adapun sumber pendanaan lainnya dari bantuan APB Desa Gogodeso. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber anggaran dari kebijakan kampung KB telah berjalan dengan baik tetapi dalam hal pelaporan dan pertanggung jawaban belum maksimal, hal tersebut disimpulkan dari temuan bahwa dalam penelitian ini tidak didapatkan pemaparan terkait dengan besaran anggaran dan metode pertanggung jawaban dari penggunaan anggaran tersebut.

#### c. Sumber Non Manusia

Sumber daya yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan atau non manusia. Edward III menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan temuan di lapangan dapat diketahui bahwa pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi Kebijakan kampung KB. Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi Kebijakan kampung KB kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti tempat penyuluhan dan media pendukung lainnya yang digunakan dalam proses implementasi Kebijakan kampung KB masih belum optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana dalam pelaksanaan Kebijakan kampung KB merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan Kampung KB di Dusun Gogodeso. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini implementasi Kebijakan kampung KB belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kampung KB belum semua terpenuhi.

#### d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena dengan informasi yang jelas mengenai suatu kebijakan para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki.

Temuan data dari sumber daya informasi dan kewenangan sangat berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan Kebijakan kampung KB. Sumber informasi diperoleh dari masyarakat dan pemerintah Desa Gogodeso. Sedangkan kewenangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) dalam menyusun Kebijakan kampung KB untuk mengentaskan permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso. Sehingga dalam pelaksanaannya telah ditetapkan 7 program prioritas Kampung KB dalam

mengentaskan permasalahan kependudukan antara lain Program Akta Gratis; Program Pendewasaan Usia Perkawinan; Program Tamat Wajar; Program Perempuan Godes Jaya; Program PUS Sehat; Program Balita Aktif; Program Lansia Sehat. Selain ke 7 program prioritas tersebut ada 5 kegiatan lainnya yang menjadi kegiatan pembinaan oleh Poktan dan Pokja yaitu: 1. Gubug Sarasehan Baju Kencana; 2. Pokdara Kencana (Kelompok Sadar Nusantara menuju KB) 3. Arda Samawa Kencana (Arisan Pemuda Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Keluarga Berencana); 4. Yasinan TRIBINA; 5. Gebyar Produk Unggulan UPPKS.

### **c). Disposisi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Menurut Edward III, disposisi adalah yang menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dalam melaksanakan implementasi kebijakan, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya yang dapat menjadi faktor hambatan ataupun dukungan dalam proses implementasi kebijakan. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variable penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan jika implementator memiliki disposisi yang buruk dapat dipastikan bahwa proses implementasi kebijakan akan berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini Pokja dan Poktan selalu siap untuk melaksanakan kebijakan kampung KB untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Kebijakan kampung KB memiliki 7 program prioritas yang menuntut Kader Kampung KB baik Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) agar memiliki sifat positif baik dari segi kejujuran serta komitmen sehingga dapat bekerja secara optimal demi mendorong target dan sasaran program. Ke 7 program prioritas tersebut dilaksanakan selama kurun waktu 3 tahun dari 2016 sampai 2019 dan diharapkan segala bentuk permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso dapat teratasi sehingga keberhasilan *pilot project* Kampung KB dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menciptakan program serupa yang skalanya lebih luas. Dalam hal ini perilaku dari implementator yaitu Pokja dan Poktan telah memiliki kejujuran dan konsistensi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso.

#### **d) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam



implementasi kebijakan. Petunjuk teknis dalam implementasi Kebijakan kampung KB menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Edward III mengatakan suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Edward III juga menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Analisis mengenai hasil dari data yang diperoleh dalam struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi Kebijakan kampung KB pada Dusun Gogodeso dalam mengatasi permasalahan kependudukan, peneliti akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Mekanisme petunjuk teknis (SOP)

Mekanisme operasional Kampung KB digunakan sebagai petunjuk teknis dalam implementasi Kebijakan kampung KB. Bekerja atau berfungsinya berbagai langkah operasional Kebijakan kampung KB secara teratur, terencana dan terus-menerus yang satu sama lain saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi Kecamatan Kanigoro, Desa

Gogodeso, Dusun Gogodeso, dan RT/RW Desa Gogodeso dalam upaya mencapai sasaran Kebijakan kampung KB. Dijelaskan dalam mekanisme operasional memiliki 3 tahapan utama yaitu *staff meeting*, rapat koordinasi dan sarasehan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. SOP dalam implementasi Kebijakan kampung KB adalah mekanisme petunjuk teknis.

b. Struktur birokrasi (fragmentasi)

Struktur kepengurusan kampung KB ditetapkan melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/ 325/ 409.06/ KPTS/ 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kampung KB, menghasilkan kelompok kerja dan kelompok kegiatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Mengenali dan menganalisa konsep dan implementasi Kampung KB
2. Memahami dan menyajikan konsep kesepakatan rencana aksi Kampung KB
3. Memahami dan memfasilitasi kesepakatan rencana aksi KAMPUNG KB oleh masyarakat
4. Memahami dan memfasilitasi cara pengelolaan kegiatan KAMPUNG KB (dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui sarasehan).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait struktur birokrasi dalam kaitannya dengan fragmentasi dalam implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso telah berjalan baik. Pada implementasi Kebijakan kampung KB di Dusun Gogodeso telah terjalin

koordinasi antar pelaksana Kebijakan Kampung KB di Dusun Gogodeso yaitu melalui kerjasama antara Bupati Blitar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Camat Kanigoro, Kepala Desa Gogodeso, PPKB, PKK Desa Gogodeso, PKB, Bidan Desa Gogodeso, BPD, Kepala Dusun, PPKBD dan Kader Kampung KB. Melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas, Kebijakan kampung KB sebagai program inovasi KKBPK dapat berjalan dengan baik.

Fragmentasi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang mengatakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kepada unit-unit organisasi. Fragmentasi yang dilakukan Bupati Blitar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Camat Kanigoro, Kepala Desa Gogodeso, PPKB, PKK Desa Gogodeso, PKB, Bidan Desa Gogodeso, BPD, Kepala Dusun, PPKBD dan Kader Kampung KB di Dusun Gogodeso dalam implementasi Kebijakan kampung KB mengatasi permasalahan kependudukan akan terus berjalan efektif ketika pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dengan penyebaran tanggung jawab yang baik.

Pejelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan kampung KB pada Dusun Gogodeso telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/ 325/ 409.06/ KPTS/ 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kampung KB. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan Kebijakan kampung KB, walaupun masing-masing aparat pelaksana

Kebijakan kampung KB mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana Kebijakan kampung KB.

**2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, meliputi:**

**a) Faktor Pendukung**

Menurut Meter dan Horn (Agustino, 2008: 142), keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Adapun bentuk dukungan yang ditemukan dalam proses implementasi Kebijakan kampung KB adalah sebagai berikut:

**1. Partisipasi masyarakat**

Berdasarkan uraian temuan dilapangan bahwasannya pelaksanaan Kebijakan kampung KB mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat Dusun Gogodeso, hal tersebut dapat terlihat dari antusiasme warga masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang telah dicanangkan oleh Pokja dan Poktan. Bentuk dukungan partisipasi masyarakat ini cenderung mendorong implementator lebih mudah untuk mencapai target dan sasaran dari kebijakan kampung KB.

## 2. Kemitraan Kampung KB

Bentuk dukungan kemitraan dalam implementasi Kampung KB adalah kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan mitra terkait seperti halnya organisasi keagamaan (Muslimat NU, LKKNU, Aisyiyah, Muhamadiyah, Fapsedu), organisasi kemasyarakatan (PKK, Kowani), organisasi swasta (Apindo dan perusahaan swasta lainnya), organisasi profesi (IBI, IDI, Pogi dll). Langkah kerjasama dan kemitraan yaitu melakukan penjajakan dengan calon mitra sehingga diperoleh penyamaan persepsi/ negosiasi dan melaksanakan pengaturan peran dari masing-masing pihak (tugas dan tanggung jawab). Dukungan kemitraan sangat berperan positif bagi Pokja dan Poktan dalam menjalankan kegiatan Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso.

### **b) Faktor Penghambat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Pelaksanaan Kebijakan kampung KB tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang menyulitkan pengimplementasiannya. Dalam tataran pelaksanaan selama 15 bulan terdapat berbagai hambatan yang ditemukan oleh Pokja dan Poktan di lapangan. Bentuk-bentuk hambatan tersebut antara lain adalah pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Dusun Gogodeso tentang Kampung KB (Nama, konsep dan kriteria lokasi) masih kurang karena Tim/Pokja dan Poktan di semua tingkatan wilayah belum mantap dikarenakan adanya faktor internal karena kurangnya tenaga ahli yang mendampingi di awal pelaksanaan Kebijakan kampung KB. Konsistensi dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang kampung KB (Nama, konsep dan kriteria lokasi) hal ini terjadi

karena masyarakat cenderung memahami bahwa tujuan dari kebijakan kampung KB akan sama dengan program KB pada umumnya. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan kampung KB khususnya dalam hal penyuluhan menggunakan fasilitas seadanya baik dari lokasi di Balai Desa atau rumah kepala dusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1). Implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso yang mengadaptasi implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi, sebagai berikut:

##### **a) Komunikasi**

Komunikasi mengenai transformasi, kejelasan, dan konsistensi. implementasi kebijakan kampung KB telah berjalan efektif. implementasi yang telah transformasikan tujuan-tujuan dari penetapan Kebijakan kampung KB dalam mencapai tujuannya secara efektif. Ukuran dan tujuan kebijakan kampung KB telah dikomunikasikan secara tepat pada pelaksanaannya. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan kebijakan kampung KB yang telah dikomunikasikan sehingga masyarakat desa Gogodeso mengetahui secara tepat dari Kebijakan kampung KB.

## b) Sumber Daya

Sumber daya yang terdapat dalam implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada Dusun Gogodeso memiliki 4 (empat) Indikator dari hasil penelitian di lapangan antara lain :

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi Kebijakan kampung KB telah memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia mempunyai ketepatan dan kelayakan antara jumlah yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang dilakukan.

### b. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan sangat berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan Kebijakan kampung KB. Sumber informasi diperoleh dari masyarakat dan pemerintah Desa Gogodeso. Sedangkan kewenangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) dalam menyusun kebijakan kampung KB untuk mengentaskan permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso.

### c) Disposisi

Kebijakan kampung KB dalam Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) memiliki sifat positif serta komitmen. Sehingga implementasi Kebijakan kampung KB dapat berjalan dengan baik untuk mendorong target dan sasaran program. Dalam hal ini perilaku dari implementator yaitu Pokja dan Poktan



telah memiliki kejujuran dan konsistensi yang baik dalam pelaksanaan Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso.

#### d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, yaitu: pertama, mekanisme petunjuk teknis (SOP) yang digunakan sebagai petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan kampung KB. Kedua, struktur kepengurusan kampung KB yang berkaitan dengan fragmentasi dalam implementasi kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Dusun Gogodeso dan telah berjalan baik.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kabupaten Blitar, meliputi:

#### a). faktor pendukung

##### 1. Partisipasi masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang telah dicanangkan oleh Pokja dan Poktan. Bentuk dukungan partisipasi masyarakat ini cenderung mendorong implementator lebih mudah untuk mencapai target dan sasaran dari kebijakan kampung KB.

##### 2. Kemitraan Kampung KB

Bentuk dukungan kemitraan dalam implementasi Kebijakan kampung KB melibatkan kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan mitra terkait seperti halnya organisasi keagamaan (Muslimat NU, LKKNU, Aisyiyah, Muhamadiyah, Fapsedu), organisasi kemasyarakatan (PKK, Kowani), organisasi

swasta (Apindo dan perusahaan swasta lainnya), organisasi profesi (IBI, IDI, Pogi dll). Langkah kerjasama dan kemitraan yaitu melakukan penjajakan dengan calon mitra sehingga diperoleh penyamaan persepsi/ negosiasi dan melaksanakan pengaturan peran dari masing-masing pihak (tugas dan tanggung jawab).

#### b) Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan kampung KB selama 15 bulan terdapat berbagai hambatan yang ditemukan oleh POKJA dan POKTAN di lapangan. Bentuk-bentuk hambatan tersebut antara lain adalah pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Dusun Gogodeso tentang kampung KB (Nama, konsep dan kriteria lokasi) masih kurang. Konsistensi dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang kampung KB (Nama, konsep dan kriteria lokasi) hal ini terjadi karena masyarakat cenderung memahami bahwa tujuan dari kebijakan kampung KB akan sama dengan program KB pada umumnya. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan kampung KB khususnya dalam hal penyuluhan menggunakan fasilitas seadanya baik dari lokasi di Balai Desa atau rumah kepala dusun.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan terkait dengan implementasi Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Desa Gogodeso, Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana baik dari segi tempat dan peralatan yang digunakan dalam menunjang implementasi Kebijakan kampung KB harus ditingkatkan oleh kepala desa Gogodeso pada kebijakan kampung KB;

2. Pelaporan penerimaan dan penggunaan anggaran harus mengadaptasi prinsip transparansi dan akuntabel supaya dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Kebijakan kampung KB dengan pendekatan partisipatif aktif agar target dan sasaran dari Kebijakan kampung KB dalam mengatasi permasalahan kependudukan dapat tercapai;
4. Pelatihan Kelompok Kerja dan Kelompok kegiatan berupa workshop, seminar maupun diklat harus diintensifkan karena permasalahan kependudukan cenderung mengalami perubahan mengikuti alur ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga perlu adanya inovasi kegiatan diluar program dari implementasi Kebijakan kampung KB;
5. *Stakeholder* terkait memberikan dukungan dana lebih maksimal agar pelaksanaan Kebijakan kampung KB berjalan dengan baik;
6. Masyarakat harus diedukasi terkait dengan tujuan dari Kebijakan kampung KB;

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2009. *PILKADA dan Dinamika Politik Lokal*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blitarkab.bps.go.id*
- Dokumen profil Desa Gogodeso. 2016
- Dokumen profil Kampung KB Dusun Gogodeso. 2016
- Gadjong, Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juknis Kampung KB, 2015
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Mathew B., Huberman, A. Michael. Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebooks*. SAGE Publication. Third Edition.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model - model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2010. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan, M.B.A. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soimin. 2010. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No.1.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Wahab, Abdul, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Abdul, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.



PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KEPENDUDUKAN, KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor  
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 322);

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 384);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 710);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut

Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

2. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
3. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
4. Penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang

selanjutnya disebut Penggerakan Program KKBPK adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi orang per orang, kelompok orang/masyarakat, komunitas, dan organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan sesuatu di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5. Program Kependudukan adalah upaya sistimatis, terencana dan berkesinambungan dari pemerintah untuk mempengaruhi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk.
6. Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program KB adalah upaya sistimatis, terencana dan berkesinambungan dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
7. Program Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

8. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Pendayagunaan Penyuluh KKBPK adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan tenaga Penyuluh KKBPK sebagai tenaga Penyuluh dan Penggerak pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Lini Lapangan.
9. Lini Lapangan adalah rangkaian aktifitas penyelenggaraan operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayah yang paling dekat dengan keluarga atau masyarakat, yaitu Kecamatan – Desa/Kelurahan – dusun/Rukun Warga – Rukun Tetangga – keluarga.
10. Layanan utama pendayagunaan PKB dan PLKB adalah penyuluhan dan penggerakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Non Kementeriaan yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden terkait pengendalian penduduk dan

pembangunan keluarga.

12. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten dan Kota yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.
13. Anggaran Operasional adalah anggaran Dinas yang bersumber APBN/APBD sebagai akibat pendayagunaan atau beban kerja bagi PKB dan PLKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
14. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
15. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat

Desa/Kelurahan.

16. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Rukun Warga.
17. Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
18. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
19. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada Petugas

dan Pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Mitra Kerja) dalam operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Kecamatan.

20. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Dalduk Dan KB yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:

- a. tercapainya layanan utama pendayagunaan tenaga Penyuluh KKBPK;



- b. meningkatkan kinerja di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota; dan
- c. memastikan bahwa tenaga Penyuluh KKBPK didayagunakan untuk melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif dan efisien.

### BAB III

#### PENDAYAGUNAAN TENAGA

#### PENYULUH KKBPK

#### Bagian Kesatu

#### Penempatan Penyuluh KKBPK

#### Pasal 4

- (1) Dalam upaya mewujudkan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota melakukan pemetaan untuk penempatan tenaga Penyuluh KKBPK.
- (2) Penempatan tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berikut:
  - a. jumlah keluarga dan jumlah penduduk;
  - b. jumlah desa atau jumlah kelurahan; dan

- c. daerah perkotaan dan pedesaan dengan geografis yang berat atau daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
- (3) OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota membuat usulan penempatan tenaga Penyuluh KKBPK kepada BKKBN.
  - (4) BKKBN memberikan persetujuan dan/atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan penempatan tenaga Penyuluh KKBPK.
  - (5) Apabila memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka OPD Bidang Dalduk dan KB membuat Surat Tugas penempatan, dan apabila tidak memberikan persetujuan dengan alasan untuk ditindak lanjuti oleh OPD Bidang Dalduk dan KB.
  - (6) OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota menempatkan tenaga Penyuluh KKBPK sesuai persetujuan dari BKKBN.

## Bagian Kedua

### Mutasi Wilayah Kerja

#### Pasal 5

- (1) Untuk upaya mewujudkan program KKBPK, OPD

Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota dapat melakukan mutasi wilayah kerja Penyuluh KKBPK antar Kecamatan dalam satu wilayah daerah Kabupaten/Kota serta antar daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Mutasi wilayah kerja Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Untuk mutasi wilayah kerja antar daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan atau formasi.
- (4) OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota membuat usulan mutasi wilayah kerja tenaga Penyuluh KKBPK kepada BKKBN.
- (5) BKKBN memberikan persetujuan dan/atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan mutasi wilayah kerja terhadap usulan penempatan tenaga Penyuluh KKBPK.
- (6) Apabila memberikan persetujuan sebagaimana ayat (4) maka OPD Bidang Dalduk Dan KB membuat Surat Tugas penempatan, dan apabila tidak memberikan persetujuan dengan alasan untuk ditindak lanjuti oleh OPD Bidang Dalduk Dan KB.

- (7) OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan mutasi wilayah kerja tenaga Penyuluh KKBPK sesuai dengan persetujuan dari BKKBN.
- (8) Pengaturan mengenai tata cara mutasi wilayah kerja Kabupaten/Kota Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan.

### Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas

#### Pasal 6

- (1) Dalam upaya peningkatan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melaksanakan upaya-upaya peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh KKBPK sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. kegiatan pelatihan;
  - b. orientasi;
  - c. pemberian beasiswa studi jangka panjang atau pendek; dan
  - d. bimbingan teknis kepada tenaga Penyuluh KKBPK.

- (3) Pembiayaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara peningkatan kapasitas Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan.

#### Bagian Keempat Pembinaan Disiplin Pegawai

##### Pasal 7

- (1) Dalam upaya meningkatkan kinerja Penyuluh KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan pembinaan disiplin pegawai.
- (2) Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan disiplin kepada tenaga Penyuluh KKBPK dapat menggunakan sumber informasi yang meliputi:
  - a. presensi kehadiran;
  - b. rekapitulasi kehadiran; dan

- c. data kedisiplinan lainnya.
- (4) Rekapitulasi kehadiran tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan kepada BKKBN setiap satu bulan dengan ditandatangani oleh Kepala OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan disiplin tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Penilaian Kinerja

Pasal 8

- (1) Dalam upaya meningkatkan kinerja program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan penilaian kinerja tenaga Penyuluh KKBPK.
- (2) Penilaian kinerja tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dalam ayat (1) meliputi:
  - a. penilaian sasaran kerja pegawai;
  - b. penilaian angka kredit jabatan fungsional PKB; dan
  - c. penilaian kerja Penyuluh KKBPK lainnya.

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yaitu bersifat rekomendasi dan dilaporkan ke BKKBN dengan ditandatangani oleh Kepala OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara penilaian kinerja Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan.

Bagian Keenam  
Penyediaan Sarana Kerja Operasional

Pasal 9

- (1) Untuk upaya mewujudkan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota menyediakan anggaran dan sasaran kerja operasional yang meliputi :
  - a. balai penyuluhan KB;
  - b. operasional penggunaan sarana dan prasarana;
  - c. operasional pencatatan dan pelaporan;
  - d. kendaraan bermotor roda dua;
  - e. Penyuluh KKBPK Kit;
  - f. komputer atau laptop;
  - g. KIE-KIT;dan

- h. *smartphone*.
- (2) Sarana kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang meliputi :
- a. pendataan dan pemetaan keluarga;
  - b. pertemuan perencanaan dan evaluasi;
  - c. pertemuan koordinasi mitra kerja tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. pertemuan koordinasi mitra kerja tingkat Kecamatan;
  - e. pertemuan lengkap Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan;
  - f. penyuluhan dan pergerakan masyarakat;
  - g. pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD;
  - h. pembinaan kelompok-kelompok kegiatan;
  - i. pelayanan dan Pembinaan KB;
  - j. pemantauan ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya;
  - k. pembinaan Kampung KB;
  - l. pengelolaan administrasi;
  - m. penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi program KKBPK;
  - n. penyuluhan Program KKBPK,dan;
  - o. peningkatan kapasitas Penyuluh KKBPK.



Bagian Ketujuh  
Pengendalian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh KKBPK.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyuluhan dan penggerakan program KKBPK;
  - b. pembinaan Kampung KB; dan
  - c. pelaksanaan 10 (sepuluh) langkah Penyuluh KKBPK.
- (3) OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota dapat mengembangkan pola-pola operasional Program KKBPK di Lini Lapangan.
- (4) Pengembangan pola operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Program KKBPK di Lini Lapangan.
- (5) Asas pengembangan pola operasional adalah efektif dan efisien.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan dan fungsi Penyuluh KKBPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan

Bagian Kedelapan  
Pembinaan Umum, Pengawasan,  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Dalam upaya peningkatan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan umum, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas fungsi tenaga Penyuluh KKBPK.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dalam ayat (1) meliputi :
  - a. aspek program;
  - b. aspek manajemen; dan
  - c. aspek sumberdaya manusia.
- (3) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan dan terpadu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara pembinaan umum, pengawasan, monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala Badan yang berkaitan dengan pendayagunaan Penyuluh KKBPK, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September  
2017 DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1232

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas



Kresnawati SH., M.Si



**BUPATI BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BLITAR**  
**NOMOR : 188 / 325 / 409.06 / KPTS / 2017**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA**  
**Se-KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di bentuk Kampung Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud perlu membentuk pengurus kampung Keluarga Berencana dengan susunan kepengurusan yang terdiri atas unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Kampung Keluarga Berencana se-Kabupaten Blitar Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 447/70/SJ/2C16 tentang Pencanangan dan  
Pembentukan Kampung KB;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Pembentukan  
Pengurus Kampung Keluarga Berencana Se-Kabupaten  
Blitar Tahun 2017, dengan susunan kepengurusan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kampung Keluarga Berencana sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan  
Fungsi :

1. Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk sektor terkait;
- b. menentukan target sasaran dan jadwal kegiatan;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan di Wilayah Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Blitar;
- d. merencanakan evaluasi dan penilaian dari seluruh hasil usaha kegiatan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Fungsi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Program Pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan pemantauan kegiatan;
- c. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan;

- e. mengevaluasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun laporan kegiatan;

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas pengurus Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kampung Keluarga Berencana ( Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2017 ) dengan kode rekening 2.08.2.02.01.01.15.11.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Blitar**  
**pada tanggal 28 Agustus 2017**



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Sdr. Kepala Dinas PP,KB,PPPA Kabupaten Blitar;  
2. Sdr. Camat Se-Kab. Blitar; dan  
3. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan Kampung KB.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR : 188/325 /409.06/KPTS/2017  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
 DUSUN GOGODESO DESA GOGODESO  
 KECAMATAN KANIGORO**

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Pelindung	Drs. H Rijanto, MM	Bupati Blitar
2	Penasehat	Drs. Wahid Rosidi, MM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pembina	Aan Ernawanto, SE, MM	Camat Kanigoro
4	Ketua	Choirul Anam, S.Ag	Kepala Desa Gogodeso
5	Sekretaris	Dra. Dyah Marhaeni P, MM	PKB DPPKBP3A Kec. Kanigoro
6	Bendahara	Naimatul Munawaroh	Ketua TP PKK Desa Gogodeso
7	Kelompok Kegiatan		
	a. Forum Musyawarah	Dyah Maliyawati	PKB
		Sri Sulikah	Bidan Desa
		Imam Nawawi	BPD
		Pamuji	Kepala Dusun
	b. Petugas Lini Lapangan	Endah Susilowati, SH, MM	PKB
		Pamuji Lestari	TP PKK Dusun Gogodeso
		Siti Rosiyah	PPKBD
	c. BKB	Mundi Roidah	Kader
	d. BKR	Sri Ariani	Kader
	e. BKL	Kimik	Kader
	f. UPPKS	Sri Wahyuni	Kader
	g. PIK Remaja	Mohammad Galih Nugroho	Kader


 BUPATI BLITAR,  
 RIJANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243

E-mail : bakesbang@blitarkab.go.id

**BLITAR**

**SURAT IZIN**

Nomor : 072/348/409.202.1/2017

- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 9928/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Riset/Survey.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : YOGA ARI HADI  
Alamat : Dsn Bambang RT 05 RW 02 Desa Siraman Kec. Kesamben Kabupaten Blitar  
Judul Kegiatan : Implementasi Program Kampung KB Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Pada Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar)  
Lokasi : Dinas PPKB, PP dan PA, Desa Gogodeso Kabupaten Blitar  
Waktu : Tanggal 26 Juli sampai dengan 26 Agustus 2017  
Bidang Kegiatan : Penelitian  
Nama Penanggungjawab/Koordinator : Dr. LELY INDAH MINDARTI, M.Si  
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
  - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas PPKB, PP dan PA Kab. Blitar
3. Sdr. Camat Kanigoro
4. Sdr. Kepala Desa Gogodeso Kab. Blitar
5. Yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Yoga Ari Hadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 04 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Laku-Laki  
Agama : Islam  
Alamat di Malang : Jl. Mayjen Haryono, Dinoyo gang 21 No. 11  
Alamat Asal : Siraman RT 05 RW 02 Kesamben Kab. Blitar  
NIM : 115030100111034  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik  
Universitas : Universitas Brawijaya  
No. Telepon : 085731044559  
Alamat E-mail : [yogaarihadi@gmail.com](mailto:yogaarihadi@gmail.com)



### Riwayat Pendidikan

TK : Hassanudin Siraman, Kesamben (1998-1999)  
SD : SDN Siraman 03 Kesamben, Blitar (1999-2005)  
SMP : SMPN 1 Wlingi, Blitar (2005-2008)  
SMA : SMAN 1 Talun, Blitar (2008-2011)  
PTN : Universitas Brawijaya Malang (2011-2018)

### Pengalaman Organisasi

- Tidak ada